

LAPORAN PENELITIAN



PERPUSTAKAAN USU



06000434

TRANSFORMASI INDUSTRIAL PADA KOMUNITAS NELAYAN: Studi Kasus di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Sumatera Utara

Oleh:
Drs. Agus Suriadi, M.Si.

Dibiayai Oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2005

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MEDAN
2005

PERPUSTAKAAN USU	
No. Akses	06 000 434
No. Panggil	D. 639. 2 Sur 6
Sumber	Hadiah USU
Tgl. Peng. / No. Peng.	09-01-2006

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 . Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	5
BAR II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
2.1. Tujuan Penelitian Tahun Pertama	16
2.2. Manfaat Penelitian	16
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	17
4.1. Desain Penelitian	17
4.2. Penentuan Informan Penelitian	17
4.3. Teknik Pengumpulan Data	18
4.4. Teknik Analisis Data	19
4.5. Lokasi Penelitian	19
4.6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	20
4.7. Personalia Penelitian	21
4.8. Perkiraan Biaya Penelitian	22
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
5.1. Deskripsi Daerah Penelitian	23
5.1.1. Keadaan Geografis	23
5.1.2. Keadaan Demografis	26
5.1.3. Suku	28
5.1.4. Agama	29
5.2. Karakteristik Transformasi Industrial Komunitas Nelayan Desa Sei Apung Jaya	29
5.2.1. Investasi dan Transformasi Industrial Komu- nitas Nelayan	30
5.2.2. Teknologi dan Transformasi Industrial Komu- nitas Nelayan	35

5.2.3. Manajemen dan Transformasi Industrial Komunitas Nelayan	39
5.3. Transformasi Ikatan Patron-Klien (Toke-Anak Buah) Dalam Komunitas Nelayan Desa Sei Apung Jaya	42
5.4. Transformasi Ikatan Patron-Klien dan Berlang- sungnya Diferensiasi Sosial, Komersialisasi Eko- nomi dan Peran Negara	47
5.4. I. Terjadinya Ketimpangan Pemilikan Keka- yaan	48
5.4.2. Hubungan Yang Bersifat Luwes dan Meluas (Diffuse Flexibility)	51
5.4.2.1. Difrensiasi Sosial dan Transformasi Ikatan Patron-Klien	53
5.4.2.2. Komersialisasi Ekonomi dan Trans- formasi Ikatan Patron-Klien	54
5.4.2.3. Peran Negara di Tingkat Lokal dan Transformasi Ikatan Patron-Klien	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	57
6.1. Kesimpulan	57
6.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.508 buah pulau, luas perairan 5,8 juta kilometer persegi, serta panjang garis pantai 81 .000 kilometer adalah merupakan negara maritim, bahkan dapat disebut sebagai sebuah benua maritim (BPPT-Wanhankamnas, 1996:12-17). Dari sejarah dapat pula diketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim, yang ditandai oleh pelayaran mengarungi samudera hingga ke Madagaskar, kejayaan sejumlah kerajaan di pantai Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku yang identik dengan kejayaan penguasaan laut. Karena penjajahan, bangsa Indonesia terdesak ke pedalaman, sehingga jiwa dan etos kebaharian yang telah berakar, secara perlahan mengalami kemunduran (Burger, dan Prayudi, 1960:29). Setelah kemerdekaan, perhatian kepada potensi maritim kembali muncul, terwujud antara lain dengan diintensifikannya modernisasi penangkapan ikan (di Era Orde Baru) dan membentuk Kementerian Perikanan dan Kelautan (di Era Reformasi).

Kebijakan pemerintah di bidang kelautan yang dikenal dengan modernisasi perikanan atau revolusi biru (blue revolution) merupakan faktor yang berpengaruh bagi berlangsungnya transformasi industrial pada komunitas nelayan menuju masyarakat nelayan yang memiliki ciri industrial. Keadaan ini dapat terjadi karena dalam modernisasi perikanan telah ditemukan beberapa unsur yang dapat menstimulus berlangsungnya transformasi industrial bagi komunitas

nelayan, seperti teknologi, modal, dan kelembagaan. Berlangsungnya proses transformasi industrial tersebut antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu dalam organisasi kerja, teknologi tangkap ikan, motif produksi dan struktur sosial. Meskipun modernisasi perikanan sudah berlangsung cukup lama (lebih dari tiga dekade) di Indonesia, realitas memperlihatkan bahwa masyarakat maritim (termasuk nelayan) yang berciri industrial belum sepenuhnya terwujud.

Menurut Smith (1979: 4-5), masyarakat industri maritim (termasuk komunitas nelayan) adalah masyarakat yang bermukim di daerah pesisir dengan jenis pekerjaan yang mengacu pada sumber daya laut dimana kegiatan produksinya sudah berwujud organisasi modern, teknologinya sudah maju, organisasi kerjanya lebih kompleks, motif produksinya lebih komersial, dan struktur sosialnya yang terdiferensiasi. Ciri tersebut berbeda dengan masyarakat maritim tradisional sebagaimana dikemukakan Pollnack (1988:240-248), yakni masyarakat yang bermukim di daerah pesisir dengan jenis pekerjaan berbasis pada sumber daya laut dalam ciri usaha rumah tangga, menggunakan teknologi yang masih tradisional, organisasi kerja yang sederhana, motif produksi yang sibsisten dan struktur sosial yang relatif homogen.

Dalam komunitas nelayan terjadi perubahan, dimana organisasi produksi nelayan makin kompleks seiring dengan berlangsungnya motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap. Selain hat tersebut, stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan modal, alat produksi dan keterampilan semakin tajam dalam masyarakat (Gassing, 1991).

Realitas kemiskinan¹, ketimpangan², dan kuatnya hubungan patron-klien (*patron-client*)³ menunjukkan bahwa transformasi yang berlangsung dalam komunitas nelayan belum berlangsung sepenuhnya. Realitas ini menunjukkan bahwa transformasi industrial belutn berlangsung (menyentuh) semua komunitas nelayan, yang berarti pula transformasi industrial tersebut belum sampai pada tahap yang menghantarkan masyarakatnya pada ciri industrial yang sesungguhnya. Dengan kata lain, transformasi industrial yang berlangsung dalam komunitas nelayan masih dalam tahap transisi, meskipun perkembangan investasi dan kemajuan teknologi sudah berlangsung selama tiga dekade.

Menurut Rostow (1964), transformasi industrial ditandai oleh peningkatan pendapatan perkapita, yang dengan itu pertumbuhan ekonomi tinggi tetap terpelihara. Selain itu menurut Ponsioen (1969:163) transformasi industrial juga ditandai oleh pergeseran hubungan pemodal-pekerja, dari hubungan patron-klien ke hubungan kontraktual.

Fenomena tersebut secara sosiologis mengindikasikan bahwa penerimaan terhadap perubahan belum melembaga dalam masyarakat, baik dalam hal inovasi teknis, organisasi manajemen, ataupun gaya hidup. Hal ini berkaitan dengan tipe tindakan sosial dalam masyarakat yang belum bergeser sepenuhnya dari tipe

Menurut Dahuri (1999), tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih berada di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris; Data BPS (1998), jumlah masyarakat miskin Indonesia mencapai 49.000.000 jiwa, dari jumlah tersebut, sekitar 60 % nya merupakan masyarakat pesisir (termasuk nelayan)

² Studi yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dalam kounitas nelayan, lihat Lampe dan Salman (1996); Tarigan (1991); dan Zulkifli (1989).

³ Hasil penelitian yang berkaitan dengan kelembagaan patron-klien dalam komunitas nelayan, lihat Zulkifli (1989); Ahimsa Putra (1991); Badaruddin (2001).

tindakan preskriptif ke tipe tindakan elektif (Germam, 1981:117). Di satu sisi pilihan tindakan terikat pada tradisi budaya, di sisi lain pilihan tindakan mengacu pada otoritas individu mengapresiasi perubahan. Dalam interaksi sosial, atau lebih jauh lagi dalam pola distribusi kekuasaan dalam masyarakat, akibat lebih jauh dari belum terwujudnya elektivitas tindakan sosial adalah bertahannya ikatan patron-klien (*patron-client*), sehingga relasi kepatuhan industrial, yang menjadi ciri utama dalam interaksi sosial pada masyarakat industri juga belum terwujud sepenuhnya.

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi kelautan cukup besar, yaitu daerah Pantai Timur dan Pantai Barat, yang juga telah mengalami berbagai perubahan (transformasi industrial). Hal ini ditandai dengan masuknya berbagai teknologi tangkap ikan yang modern dan diferensiasi sosial (pembagian kerja) yang semakin kompleks di kawasan pantai Sumatera Utara. Namun demikian, perubahan tersebut belum menunjukkan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi nelayan dalam arti peningkatan pendapatan dan pemerataan penghasilan. Di samping itu, realitas juga memperlihatkan bahwa belum semua komunitas nelayan mengadopsi modernisasi perikanan tersebut.

Fenomena tersebut merupakan realitas empiris yang berlangsung dalam komunitas nelayan, khususnya komunitas nelayan di Sumatera Utara. Atas dasar itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Transformasi Industrial dalam Komunitas Nelayan, dengan mengambil kasus pada komunitas nelayan di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Sumatera Utara.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik transformasi industrial yang berlangsung dalam komunitas nelayan di Desa Sei Apung Jaya.
2. Apakah berlangsung transformasi ikatan patron-klien dalam komunitas nelayan tersebut.
3. Bagaimana bentuk transformasi ikatan patron-klien tersebut di tengah berlangsungnya diferensiasi sosial, komersialisasi ekonomi dan adanya peran negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam teori modernisasi, proses transformasi menuju masyarakat industri dapat dijelaskan melalui teori diferensiasi sosial, yang menyebutkan bahwa transformasi menuju masyarakat industri identik dengan proses semakin terdiferensiasinya masyarakat. Penjelasan ini berasal dari teori Durkheim (1964) tentang pembagian kerja dalam masyarakat.

Secara struktural Durkheim (1964:200-2006) menjelaskan bahwa pada masyarakat industri, struktur pekerjaan sangat kompleks dan pembagian kerja terspesialisasi, karena dalam masyarakat berkembang berbagai jenis pekerjaan dan dalam setiap pekerjaan berkembang beberapa divisi kerja. Karena dalam masyarakat industri kelompok masyarakat terbagi dalam berbagai divisi kerja, maka heterogenitas sosial menjadi lebih tinggi dan kerjasama antar divisi kerja sangat dibutuhkan, sehingga saling ketergantungan dalam masyarakat sangat tinggi. Ciri ini menurut Durkheim, merupakan tipikal masyarakat dengan tipe solidaritas organik. Pembagian kerja pada komunitas industri penangkapan ikan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Ketika menggunakan teknologi tradisional seperti pancing dan bubu, maka pembagian kerja tidak ada. Pembagian kerja hanya terlihat antara pria dan wanita.

Tingginya diferensiasi sosial dalam masyarakat industri amat dipengaruhi oleh keterlibatan mesin; kapital, dan keahlian dalam proses kerja yang berlangsung, yang pada gilirannya mengklasifikasi pekerja industri berdasarkan

penguasaan atas unsur-unsur produksi tersebut, sehingga terlahirkan kelompok profesional, manajerial, teknikal, dan pekerja rendah (Kerr, Dunlop, Harbison dan Myers, 1994:660). Kondisi inilah yang membedakan diferensiasi sosial masyarakat industri dari diferensiasi sosial pada masyarakat non industri. Kerr, Dunlop, Harbison dan Myers (1994:662) menyimpulkan bahwa:

The labor force of the industrial society is highly differentiated by occupations and job classification, by rates of compensation, and by a variety of relative rights and duties in work place community. It has form and structure vastly different from the more home geneous labor force of the traditional society.

Perkembangan lebih jauh dari pembagian kerja adalah terdiferensiasinya lembaga-lembaga dalam masyarakat (Smelser, 1968). Diferensiasi lembaga disebabkan oleh terspesialisasinya fungsi-fungsi dalam masyarakat, yang setiap fungsi dijalankan oleh lembaga spesifik. Agar integrasi sosial tetap tercipta, koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan, karena itu lembaga yang mengkoordinasikan fungsi antar lembaga juga tumbuh dalam masyarakat. Semakin terdiferensiasi lembaga masyarakat, dan semakin efektif fungsi dari koordinasi antar lembaga, maka akan semakin ideal ciri masyarakat industri yang tercipta. Dalam konteks komunitas nelayan, pengorganisasian komunitas nelayan berdasarkan spesialisasinya merupakan keharusan untuk sampai kepada masyarakat nelayan yang berciri industrial.

Dalam penjelasan diferensiasi sosial, diasumsikan bahwa arah evolusi suatu masyarakat secara uni direksional selalu menuju pada semakin terdiferensiasinya masyarakat. Dengan demikian, diferensiasi sosial dapat dijadikan variabel penjelas sejauh mana suatu masyarakat telah bertransformasi

menuju masyarakat industri. Semakin terdiferensiasi suatu masyarakat, berarti semakin akseleratif transformasinya menuju masyarakat industri. Variabel penjelas ini juga akan dijadikan untuk melihat berlangsungnya transformasi industrial dalam komunitas nelayan di daerah penelitian.

Masyarakat nelayan di Sumatera Utara adalah komunitas lokal yang memiliki ciri tersendiri. Dengan ciri tersebut, pengaruh perkembangan investasi, teknologi dan manajemen dalam menggerakkan transformasi industrial akan mengalami artikulasi. Artikulasi dimaksud adalah munculnya ciri perkembangan industri yang berbeda dari ciri perkembangan industri pada masyarakat Barat (Salman, 2002). Perbedaan demikian terjadi karena adanya koeksistensi antara ciri tata produksi kapitalisme atau industrial yang dimunculkan oleh perkembangan investasi, teknologi dan manajemen dengan ciri tata produksi feodalisme atau non industrial yang merupakan unsur asli dalam masyarakat.

Untuk memahami berlangsungnya transformasi sosial dalam komunitas nelayan di Desa Sei Apung Jaya, maka teori artikulasi akan dijadikan sebagai acuan teoritis. Teori artikulasi dari Meillasoux dan Rey (dalam Blomstrom dan Hettne, 1984:181) menyebutkan bahwa industrialisasi di negara berkembang ditentukan oleh terbentuknya formasi sosial berdasarkan koeksistensi antara cara produksi kapitalisme yang datang dari luar dengan cara produksi pra-kapitalisme yang bersifat asli. Dikatakan bahwa artikulasi antara ciri kontekstual pada tingkat lokal dengan ciri yang dibawa oleh kapitalisme selalu mewarnai industrialisasi pada negara berkembang. Teori ini relevan dengan pendekatan kontekstual yang

ditekankan Saefullah (1995:33), bahwa perubahan sosial di pedesaan umumnya dipengaruhi oleh faktor kontekstual pada tingkat lokal.

Transformasi industrial adalah proses yang melibatkan pengembangan teknologi dan metode kerja (Ponsioen, 1969:158), perkembangan organisasi kerja dan manajemen produksi (Schneider, 1986:108), dan perkembangan investasi masyarakat (Rostow, 1964:291). Dalam transformasi industrial, industri pedesaan merupakan bentuk transisi yang perkembangannya dapat berfungsi mengakumulasi dan mentransfer modal dari tata produksi berciri feodal atau non industrial ke tata produksi berciri kapitalistik atau industrial (Saith, 1986:170).

Menurut Triyakian (1992:79), dalam perubahan sosial atau modernisasi, terdapat dua proses signifikan yang terjadi yaitu diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan. Dikatakan bahwa dua proses ini yang menentukan sejauhmana perubahan sosial atau modernisasi tetap diikuti oleh integrasi masyarakat dan terhindarkan dari patologi sosial. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan merupakan faktor yang harus dianalisis karakteristik dan keseimbangan perkembangannya.

Triyakian (1992:91) juga menyimpulkan bahwa dua proses tersebut tidak berlangsung linier, melainkan terjadi proses balik dalam bentuk dediferensiasi dan dalam bentuk derasionalisasi untuk rasionalisasi. Dianjurkan bahwa perubahan sosial atau modernisasi dilihat dengan pendekatan dialektik antara diferensiasi dan rasionalisasi dan mempertimbangkan dediferensiasi dan derasionalisasi sebagai proses baliknya. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan tidak hanya dilihat dalam hal karakteristik dan

keseimbangan perkembangan antara keduanya, tetapi juga pada proses balik terhadap keduanya dalam bentuk dediferensiasi dan derasionalisasi.

Dengan acuan yang demikian, perkembangan investasi, teknologi manajemen pada komunitas nelayan tradisional, akan mendorong terjadinya diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan. Dugaan ini didasarkan pada argumen bahwa perkembangan investasi, teknologi, dan manajemen adalah stimulan perubahan sosial dalam konteks transformasi industrial, dan karena diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan adalah proses yang signifikan dalam perubahan sosial, berarti perkembangan investasi, teknologi, dan manajemen akan mendorong diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan tersebut.

Salah satu indikator dari transformasi industrial adalah pergeseran bentuk hubungan industri di dalamnya. Hubungan industri tersebut bergeser dari ciri hubungan patron-klien ke ciri hubungan kontraktual (Ponsioen, 1969), dari ciri hubungan yang *multiplex* (hubungan kerja yang berlangsung berulang kali sehingga mempribadi) ke ciri hubungan yang *simplex* (hubungan kerja impersonal dengan mekanisme kerja yang mengacu pada sistem pasar) [Legg, 1983], atau dari ciri hubungan yang berbasis moral ke ciri hubungan yang berbasis rasionalitas (Popkin, 1979). Dalam penelitian ini, pergeseran hubungan patronklien ke hubungan industrial dijadikan indikator dari transformasi industrial yang berlangsung.

Menurut Scott (1972b:8), hubungan patron-klien adalah hubungan antara dua orang yang berbeda kedudukan sosial-ekonominya, pihak yang berkedudukan tinggi memberi perlindungan dan keuntungan yang dibalas oleh pihak yang lebih

rendah dalam bentuk dukungan atau jasa pribadi. Lebih lanjut Scott (1972a:92) menyebutkan bahwa hubungan patron-klien tersebut dicirikan oleh: (1) ketimpangan pertukaran (*inequality of exchange*), yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan. Klien adalah seseorang yang masuk dalam hubungan pertukaran tidak seimbang, dimana ia tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian patron, hutang kewajiban mengikatnya dan bergantung kepada patron; (2) bersifat luwes dan meluas (*diffuse and flexibility*), sifat meluas terlihat dari tidak terbatasnya hubungan pada hubungan kerja saja, melainkan juga hubungan pertetanggaan, kedekatan secara turun temurun atau persahabatan di masa lalu, selain itu juga terlihat pada jenis pertukaran yang tidak melulu uang atau barang tetapi juga bantuan tenaga dan dukungan kekuatan; dan (3) ciri mempribadi (*face to face character*), yaitu meskipun hubungan ini bersifat instrumental dimana kedua pihak memperhitungkan untung rugi, namun unsur rasa tetap berpengaruh karena adanya kedekatan hubungan.

Apa yang dikemukakan oleh Scott, sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Legg (1983). Legg (1983:10) memberikan beberapa ciri hubungan patron-klien, yaitu tautan hubungan tuan-hamba pada umumnya berkenaan dengan: (1) hubungan di antara para pelaku atau perangkat para pelaku yang menguasai sumberdaya yang tidak sama; (2) hubungan yang bersifat khusus (*particularistic*) hubungan mempribadi dan sedikit banyak mengandung kemesraan (*affectivity*); dan (3) hubungan yang berdasarkan rasa saling menguntungkan dan saling memberi serta menerima. Selanjutnya Legg menyebutkan tiga syarat terbentuknya hubungan patron-klien yaitu: *pertama*, para

sekutu (*partner.*) menguasai sumber-sumber yang tidak dapat diperbandingkan (*noncomparable resources*); *kedua*, hubungan tersebut memprivasi (*personalized*); dan *ketiga*, keputusan untuk mengadakan pertukaran didasarkan pada pengertian saling menguntungkan dan timbal balik (*mutual benefit and reciprocity*).

Ketidakseimbangan pertukaran dalam hubungan patron-klien harus dilihat dari sisi norma timbal balik (*norm of reciprocity*) dalam masyarakat, bahwa orang seharusnya membantu mereka yang menolongnya, dan jangan menyakiti para penolong tersebut (Gouldner, 1977). Tetapi tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial seimbang, karena resiprositas memang mampu menimbulkan keseimbangan struktur sosial, tetapi di balik itu ia bisa menciptakan ketidakseimbangan di tingkat lain (Blau, 1964).

Terkait dengan ketidakseimbangan pertukaran (eksploitasi patron atas klien) terjadi perdebatan pendapat di antara para ahli. Scott (1981) menyatakan bahwa saat klien dalam kondisi paceklik atau ketika statusnya betul-betul rendah sehingga bila putus hubungan dengan patron ia tidak punya alternatif status yang lebih rendah lagi, maka perlakuan apapun di balik bantuan patron sulit dikaitkan dengan eksploitasi. Sementara itu Popkin (1979:27) mengatakan bahwa asumsi moralistik dalam hubungan patron-klien agak berlebihan, di balik bantuan patron kepada klien terdapat pertimbangan yang menyangkut kepentingan dirinya, bahwa bantuan itu adalah investasinya untuk mempertahankan ketergantungan klien itu sendiri, dengan demikian eksploitasi bukanlah hal yang tidak mungkin.

Menurut Scott (1972b:58), ada beberapa kondisi yang memungkinkan lahirnya hubungan patron-klien, yaitu perbedaan penguasaan sumber daya, kekayaan dan kekuasaan, tidak adanya pranata yang menjamin keamanan dan lemahnya ikatan kekerabatan untuk perlindungan individu. Sementara itu Boissevain (1966) beranggapan bahwa hubungan patron-klien muncul karena ia merupakan bagian dari upaya manusia untuk bertahan hidup dalam keadaan tertentu, karena itu ia adalah bagian dari strategi adaptasi manusia. Kedua pendapat ini dapat dikomplementasikan sebagai kerangka analisis.

Penelitian Zulkifli (1989) terhadap masyarakat nelayan di Sumatera Utara (Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kodya Medan) menemukan bahwa pola hubungan patron-klien yang termanipestasi dalam bentuk hubungan antara pemborong dan anak buah lebih disebabkan perbedaan penguasaan sumberdaya, khususnya kekayaan (ekonomi). Hasil penelitian Badaruddin (2001) terhadap kelembagaan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Dusun Nelayan Desa Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara menunjukkan bahwa bertahannya hubungan patron-klien disebabkan ketimpangan sumberdaya ekonomi. Penelitian Ahimsa Putra (1988:159) mengenai kondisi yang melahirkan hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa kondisi yang dinyatakan Scott (1972b) memang terpresentasikan dalam tatanan masyarakat di masa lalu. Kondisi dimaksud adalah ketimpangan kekuasaan, ketimpangan kekayaan dan ketidakamanan sosial. Pemilikan terhadap *gaukang* (ornamen kebangsawanan) dan penguasaan atas tanah merupakan sumberdaya yang menjadi pangkal ketimpangan tersebut, sedangkan pertentangan antar bangsawan, perang

antar kerajaan, serta pencurian dan perampokan adalah pangkal dari ketidakamanan sosial dimaksud.

Hubungan patron-klien akan mengalami erosi bila diferensiasi sosial, komersialisasi ekonomi, dan peran negara signifikan dalam masyarakat. Diferensiasi sosial membuka berbagai bentuk hubungan di pedesaan, komersialisasi ekonomi mendorong individualisme, peran negara menjamin keamanan sosial, sehingga faktor itu dapat mengikis hubungan patron klien (Scott, 1972b).

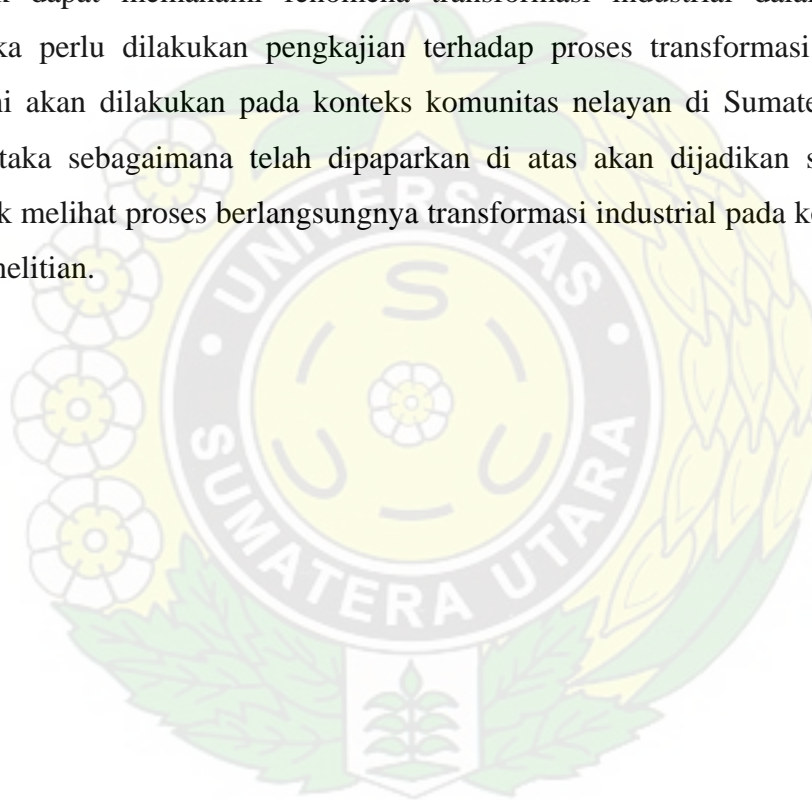
Transformasi menuju masyarakat industri ditandai oleh meningkatnya mobilitas pekerjaan, dalam arti terjadinya pergeseran dari ciri manual ke ciri non manual, sehingga jelas terbedakan antara kelas menengah dengan kelas pekerja (Lipset, Bendix dan Zetterberg (1994). Selain pergeseran dari ciri manual ke non manual, kelas profesional dan manajerial juga berkembang, mereka adalah enterpreneur ataupun pekerja terampil, mereka inilah yang sering disebut sebagai kelas menengah (Golthorpe, 1992). Perubahan demikian merupakan faktor yang dapat mereduksi ikatan patron-klien dalam hubungan kerja masyarakat industri.

Secara kultural, Weber (1958) menjelaskan bahwa transformasi menuju masyarakat industri identik dengan munculnya tindakan rasional dalam masyarakat. Tindakan rasional dimaksudkan dengan tindakan yang mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pada masyarakat modern-industrial, rasionalitas masyarakat adalah rasionalitas instrumental, dalam arti individu bertindak sesuai tujuan yang diinginkannya. Pada masyarakat tradisional -non industrial,

rasionalitas masyarakat adalah rasionalitas moral, dalam arti individu bertindak berdasarkan pertimbangan moral. Semakin rasionalitas-instrumental tipe tindakan sosial, semakin berciri industrial masyarakat tersebut.

Lebih lanjut Weber (1978) menerangkan bahwa ciri hubungan kerja dalam masyarakat industri ditandai oleh kondisi tenaga kerja bebas, kondisi yang di dalamnya pekerja terpisah dari tata produksinya, harga tenaga kerja ditentukan oleh mekanisme pasar, organisasi produksi berciri rasional-kapitalis, rumah tangga terpisah dari tempat kerja, dan pekerja dengan pemodal terikat hubungan kerja karena adanya kalkulasi untung rugi.

Untuk dapat memahami fenomena transformasi industrial dalam konteks yang berbeda maka perlu dilakukan pengkajian terhadap proses transformasi industrial, yang dalam hal ini akan dilakukan pada konteks komunitas nelayan di Sumatera Utara. Kajian tinjauan pustaka sebagaimana telah dipaparkan di atas akan dijadikan sebagai kerangka analisis untuk melihat proses berlangsungnya transformasi industrial pada komunitas nelayan di daerah penelitian.



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik transformasi industrial yang berlangsung pada komunitas nelayan (khususnya di desa yang dijadikan sebagai kasus penelitian) terkait dengan perkembangan investasi, teknologi dan manajemen. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proses berlangsungnya transformasi ikatan patron-klien, serta mendapatkan penjelasan bagaimana bentuk ikatan patron-klien di tengah terus berlangsungnya proses diferensiasi sosial, komersialisasi ekonomi dan peran negara yang semakin menguat.

3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan (aspek teoritis), penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan konsep-konsep perubahan sosial khususnya yang berkaitan dengan transformasi industrial pada komunitas nelayan.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat maritim (nelayan).

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsi dan menganalisis karakteristik transformasi industrial yang berlangsung dalam komunitas nelayan, yang terkait dengan proses transformasi ikatan patron-klien sebagai bagian dari konteks sosial budaya, serta mendeskripsikan bentuk transformasi ikatan patron-klien yang tengah berlangsung. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Strauss dan Corbin (1994), bahwa hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi proses dan mekanisme perubahan, terutama dalam konteks historis, baik pada dimensi kultural maupun dimensi struktural, juga menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan dan analisis datanya.

4.2. Penentuan Informan Penelitian

Untuk pengumpulan data kualitatif, penentuan informan didasarkan pada informasi awal tentang warga komunitas yang terlibat dalam kegiatan nelayan, baik sebagai nelayan buruh, nelayan tradisional, nelayan pemilik, maupun toke (pedagang/pemborong ikan). Informasi tentang hal ini terutama diharapkan dari petunjuk aparat kantor desa atau kepala lingkungan (kepala RT). Kepada informan awal yang telah diwawancarai ditanyakan tentang warga komunitas yang dapat dijadikan informan berikutnya. Di samping teknik *snow ball* seperti

itu, dimungkinkan pula bagi peneliti untuk menentukan sendiri informan setelah bermukim di lokasi penelitian.

Di samping informan yang terlibat langsung dengan kegiatan nelayan, aparat tingkat desa dan tokoh masyarakat yang menguasai sejarah perkembangan komunitas, serta tokoh-tokoh lain yang dianggap perlu akan dijadikan sebagai informan. Penentuan informan yang seperti ini dilakukan agar prinsip triangulasi pengumpulan data dapat dipraktekkan, yaitu suatu tema pertanyaan tidak hanya diandalkan informasinya pada satu sumber, kebenaran informasi didasarkan pada beberapa informan.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik pengamatan berperan serta (*participant observation*) terhadap situasi kehidupan komunitas nelayan, teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan. Teknik dokumentasi juga akan digunakan bila memang tersedia dan dianggap relevan dengan penelitian ini, seperti buku harian, arsip, data statistik, dan sebagainya.

⁴ Tentang teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, lihat Strauss dan Corbin (1991), Denzin dan Lincoln (1994); Cresswell (1998).

4.4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan dengan fokus utama pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mengacu pada Mils dan Huberman (1992), maka reduksi data dalam penelitian ini mencakup pemilihan, penyederhanaan data, abstraksi data dan transformasi data kasar dari catatan lapangan.

Penyajian data (informasi) merupakan kegiatan penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya.

Analisis data dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif setelah pulang dari lapangan. Seluruh data yang telah tersedia ditelaah, direduksi, kemudian diabstraksikan sehingga terbentuk satuan informasi. Satuan informasi ini ditafsirkan menjadi kesimpulan. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.

4.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan secara purposive di Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa industri penangkapan ikan sudah cukup berkembang di desa ini.

Nelayan di desa ini merupakan suatu komunitas yang bermukim di sekitar pantai dengan dinamika kehidupan yang digerakkan oleh kegiatan penangkapan dan pemasaran ikan, serta pengawetan ikan (industri perikanan). Di desa ini juga ditemui teknologi tangkap ikan dari yang “tradisional” hingga “modern”.

4.6. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian secara keseluruhan memakan waktu 10 (sepuluh) bulan dengan perincian sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No	JENIS KEGIATAN	BULAN												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10			
1	Studi Kepustakaan	X	X											
2	Penyusunan Proposal		X	X										
3	Survei Awal Lapangan				X									
4	Pengurusan Izin Penelitian					X								
5	Persiapan Lapangan (Kuesioner, pedoman wawancara)						X							
6	Penelitian Lapangan						X	X	X					
7	Tabulasi dan Analisa Data							X	X					
8	Seminar Hasil Penelitian											X		
9	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian dan Perbaikan										X	X	X	
10	Penggandaan dan Pengiriman Laporan													X

4.7. Personalia Penelitian

Personalia Penelitian ini terdiri dari:

1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Agus Suriadi, M.Si.
- b. Golongan/Pangkat/NIP : III-c/Penata Muda/132086735
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural
- e. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Kesejahteraan Sosial
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara
- g. Bidang Keahlian : Sosiologi Pembangunan, *Community Development*
- h. Waktu Untuk Penelitian : 20 jam/minggu

2. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Kariono, M.Si.
- b. Golongan/Pangkat/NIP : III-d/Penata Tk. I/ 13 1996175
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara
- g. Bidang Keahlian : Administrasi Pembangunan
- h. Waktu Untuk Penelitian : 10 jam/minggu

- 3. Tenaga Administrasi : 1 orang

4.8. Perkiraan Biaya Penelitian

1	Honorarium	
	a. Ketua Peneliti, Rp 60.000 x 10 bulan	Rp 600.000
	b. Anggota Peneliti 1 orang, Rp 50.000 x 10 bulan	Rp 500.000
	c. Tenaga Administrasi I orang, Rp 30.000 x 10 bulan	Rp 300.000
	Total 1	Rp 1.400.000
2	Bahan dan Peralatan Penelitian	
	a. Kertas HVS A4 80 gr 10 rim @ Rp 25.000	Rp 250.000
	b. Disket 1 kotak	Rp 50.000
	c. Ink Catridge BJ 03 2 buali @ 175.000	Rp 350.000
	d. Kaset Kosong 10 buah @ 8.000	Rp 80.000
	e. Batu Battrey 10 buah @ Rp 2.500	Rp 25.000
	f. Film + cuci cetak 1 roll	Rp 100.000
	Total 2	Rp 855.000
3	Perjalanan	
	a. Biaya transportasi Medan - Tanjung Balai PP untuk 1 orang @ Rp 100.000 (survei lapangan dan pengurusan izin penelitian)	Rp 100.000
	b. Biaya transportasi Medan - Tanjung Balai PP untuk 2 orang @ Rp 100.000 (pengumpulan data)	Rp 200.000
	c. Biaya akomodasi (penginapan + makan) untuk 2 orang selama 7 hari @ Rp 50.000 (pengumpulan data)	Rp 700.000
	d. Biaya transportasi Medan - Tanjung Balai PP untuk 1 orang @ Rp 100.000 (pengumpulan data lanjutan)	Rp 100.000
	e. Biaya akomodasi (penginapan + makan) untuk 1 orang selama 30 hari @ Rp 50.000 (pengumpulan data lanjutan)	Rp 1.500.000
	Total 3	Rp 2.600.000
4	Seminar Hasil Penelitian	
	a. Konsumsi untuk 40 peserta @ 15.000	Rp 600.000
	b. Potocopy makalah sebanyak 40 eks @ Rp 3.500	Rp 120.000
	Total 4	Rp 720.000
5	Laporan Penelitian	
	a. Biaya penggandaan laporan penelitian 15 eks @ 25.000	Rp 375.000
	b. Pengiriman laporan penelitian	Rp 50.000
	Total 5	Rp 425.000
	Total 1+2+3+4+5	Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Daerah Penelitian

5.1.1. Keadaan Geografis

Desa Sei Apung Jaya merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Desa tersebut berjarak kurang lebih 2 km ke ibukota kecamatan, dan berjarak kurang lebih 35 km ke Ibukota Kabupaten Asahan (Kisaran), serta kurang lebih 150 km ke Ibukota Propinsi Sumatera Utara (Medan). Desa Sei Apung Jaya hanya berjarak kurang lebih 6 km ke pusat Ibukota Kota Kotamadya Tanjung Balai, dan berbatasan langsung dengan wilayah Kotamadya Tanjung Balai. Relatif dekatnya jarak Desa Sei Apung Jaya ke Ibukota Kotamadya Tanjung Balai, membuat intensitas interaksi kedua daerah tersebut lebih dominan dibanding ke Ibukota Kabupaten Asahan (Kisaran).

Tersedianya fasilitas pelabuhan laut ke berbagai daerah lainnya dan juga angkutan kereta api di Kotamadya Tanjung Balai, telah membawa dampak bagi Desa Sei Apung Jaya, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh luar dalam hal sosial budaya. Semakin derasnya terpaan media iklan melalui berbagai media terutama televisi menyebabkan munculnya budaya konsumtif di kalangan masyarakat setempat, khususnya di kalangan remaja. Para remaja yang ada di Desa Sei Apung Jaya sering berkunjung ke Kota Tanjung Balai, khususnya pada hari libur (Minggu) dengan tujuan sekedar jalan-jalan dan terkadang juga sambil membeli sesuatu yang sebenarnya belum terlalu mereka butuhkan. Hal ini

terutama dilakukan oleh anak laki-laki yang sudah putus sekolah, yang sudah memiliki penghasilan menjadi buruh nelayan atau pekerjaan-pekerjaan nelayan lainnya seperti membersihkan kapal, jaring, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita, tersedia pula beberapa pekerjaan, seperti mengupas kerang dan menjadi buruh pada industri perikanan. Dari segi pakaian, mereka juga telah meniru gaya berpakaian masyarakat kota, walaupun masih terkesan marginal karena peniruan yang mereka lakukan tidak sepenuhnya sesuai dan pas untuk kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka. Peniruan gaya berpakaian ini dapat mereka lakukan terutama karena tersedianya pakaian bekas yang diimport dari luar negeri seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan sebagainya. Untuk Sumatera Utara, maka Kotamadya Tanjung Balai merupakan pemasok utama pakaian bekas tersebut, yang tidak hanya didistribusikan untuk beberapa daerah di Sumatera Utara, tetapi juga ke berbagai daerah lainnya, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Dikeluarkannya SK Larangan Import pakaian bekas oleh Memperindag Rini Suwandi telah mematikan usaha tersebut.

Luas Wilayah Desa Sei Apung Jaya terdiri dari 5 Km². Penggunaannya mencakup pemukiman perumahan 3 Km², ladang 1 Km² dan peruntukan lain-lain Km² (Monografi Desa Sei Apung Jaya, 2000). Menurut salah seorang warga yang telah lama bermukim di desa tersebut, luas daratan mengalami kecenderungan berkurang setiap tahunnya akibat terjadinya erosi oleh air laut.

Keadaan jalan di Desa Sei Apung Jaya sebagian sudah beraspal (saat penelitian berlangsung kondisinya dalam keadaan rusak berat/ringan) dan sebagian lagi masih berupa jalan tanah dan jalan berbatu. Di pemukiman

penduduk, hampir tidak ada jalan yang khusus, karena orang dengan leluasa dapat berjalan dari depan setiap rumah yang ada di desa tersebut. Rumah penduduk yang cukup padat dan kurang terpeliharanya kebersihan lingkungan membuat pemukiman mereka terkesan kumuh.

Fasilitas angkutan umum yang tersedia bagi penduduk desa untuk bepergian ke kota Kota Tanjung Balai maupun ke tempat-tempat lainnya sudah sangat memadai. Bagi penduduk yang ingin bepergian ke Kota Tanjung Balai, dapat menggunakan angkutan antar kota/antar pedesaan yang dikenal dengan sebutan “sudako”. Jasa angkutan “sudako” dapat terlihat dalam setiap jarak waktu kurang lebih 10 menit. Di samping sudako, jasa angkutan lain juga tersedia berupa kendaraan bermotor roda dua (ojeg), yang di daerah ini dikenal dengan sebutan RBT. Jasa angkutan ini beroperasi selama 24 jam. Ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk dari dan ke Desa Sei Apung Jaya dan sekitarnya cukup dinamis.

Kedekatan Desa Sei Apung Jaya dengan Kota Tanjung Balai membawa berkah dengan tersedianya berbagai fasilitas ke desa tersebut, seperti listrik oleh PLN, air bersih oleh PAM, dan jasa telepon. Namun demikian, menurut salah seorang informan, fasilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penduduk setempat akibat ketidakmampuan ekonomi mereka. Hanya listriklah yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, sedangkan air dan telepon hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu (orang yang memiliki kemampuan ekonomi) saja. Untuk kebutuhan air minum masyarakat setempat membeli kepada tetangga yang memiliki air bersih, sedangkan untuk kebutuhan

lainnya seperti mandi dan mencuci, mereka memanfaatkan air payau yang tidak jauh dari pemukiman mereka.

Relatif dekatnya jarak Desa Sei Apung Jaya dengan Kota Tanjung Balai dan didukung dengan tersedianya sarana transportasi yang cukup memadai menyebabkan interaksi desa kota semakin intensif. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya orang yang bepergian ke kota setiap hari dengan berbagai tujuan seperti sekolah, belanja, berdagang, buruh industri buruh bangunan dan sebagainya. Kepergian mereka ke kota umumnya dilakukan secara komuting.

Sebagaimana halnya dengan sebagian besar wilayah Indonesia lamnya, Desa Sei Apung Jaya termasuk daerah yang berada pada iklim tropis. Wilayahnya berada pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 23°C - 34°C. Dikenal ada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya berlangsung tiga bulan yaitu antara Juni hingga Agustus, sedangkan musim penghujan berlangsung sembilan bulan yaitu antara September hingga Mei.

5.1.2. Keadaan Demografis

Dilihat dari status kepemilikan tanah, semua tanah yang ada di desa ini adalah merupakan tanah milik perseorangan. Desa ini tidak mengenal adanya pemilikan tanah bengkok atau tanah jabatan dan tanah benda desa atau tanah komunal yang digunakan sebagai sumber pendapatan pemerintahan desa sebagaimana ditemui pada sebagian besar desa di Jawa. Tidak adanya sistem

pemilikan tanah seperti itu menyebabkan ambisi untuk menjadi kepala desa tidak setinggi di pedesaan yang ada di pulau Jawa pada umumnya.

Jumlah penduduk Desa Sei Apung Jaya pada 2000 ada sebanyak 8.932 orang dengan perincian 4.567 orang laki-laki, dan 4.365 orang perempuan, yang mendiami 1.574 rumah tempat tinggal dan terdiri dari 1.642 kepala keluarga. Rata-rata rumah tempat tinggal didiami oleh 5.67 orang per rumah.

Dilihat dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, meskipun ada juga sebagian kecil yang bermata pencaharian lain seperti pedagang, buruh industri perikanan, Pegawai Negeri Sipil, dan pekerjaan swasta lainnya.

Tidak ada data yang spesifik tentang keadaan pendidikan masyarakat Desa Sei Apung Jaya pada Monografi Desa Sei Apung Jaya. Namun menurut informasi dari Kepala Desa tingkat pendidikan rata-rata penduduk Desa Sei Apung Jaya adalah rendah. Bahkan sebagian besar dari penduduknya hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Menurut salah seorang informan di Desa Sei Apung Jaya, rendahnya tingkat pendidikan di desa ini lebih disebabkan keadaan ekonomi yang tidak mencukupi untuk dapat menyekolahkan anak-anak. Di samping itu, tersedianya pekerjaan mencari ikan ke laut, baik untuk membantu orang tua maupun sebagai nelayan buruh, menyebabkan anak-anak lebih tertarik untuk mendapatkan uang sejak dini. Hal ini sebenarnya sangat merugikan mereka sendiri terutama untuk perbaikan nasib di kemudian hari. Bagaimanapun, tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaan yang mungkin akan diperoleh seseorang. Fenomena ini memperkuat tesis bahwa pendidikan

masyarakat komunitas nelayan relatif rendah bila dibandingkan dengan komunitas lain seperti komunitas pertanian agraris. Keadaan ini pula yang menjadi salah satu faktor yang membuat komunitas nelayan persisten dengan kemiskinannya, karena tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang memungkinkan orang melakukan mobilitas vertikal ke atas.

Dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Sei Apung Jaya memang masih cukup memprihatinkan. Di desa tersebut hanya ada satu Sekolah Dasar. Sedangkan untuk tingkat pendidikan selanjutnya, penduduk setempat harus pergi ke desa tetangga atau ke Kota Tanjung Balai.

5.1.3. S u k u

Desa Sei Apung Jaya termasuk desa multietnik, karena didiami oleh penduduk yang terdiri dari berbagai suku (Melayu, Batak, Mandailing, Jawa, Minang, Banjar, dan Bugis). Suku terbesar yang mendiami Desa Sei Apung Jaya adalah Suku Melayu dan Suku Jawa. Orang-orang Batak dan Mandailing yang bermukim di Desa ini tidak lagi menyebut mereka sebagai orang Batak atau Mandailing, tetapi sebagai orang Melayu. Namun demikian, nama mereka tetap memiliki marga. Menurut salah seorang informan, hal ini dilakukan oleh para migran Batak dan Mandailing pada waktu yang lalu sebagai salah satu strategi adaptasi sosial agar dapat diterima oleh penduduk asli setempat, yaitu suku Melayu.

5.1.4. Agama

Penduduk Desa Sei Apung Jaya sebagian besar menganut agama Islam. Sebagian kecil lainnya beragama Kristen. Untuk menunjang kegiatan peribadatan keagamaan di Desa Sei Apung Jaya terdapat 2 buah bangunan mesjid dan 5 buah bangunan mushola (langgar). Bagi penganut Kristen, mereka harus pergi ke desa tetangga untuk melaksanakan ritual ibadah karena di desa ini belum tersedia bangunan gereja. Toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari praktek-praktek ibadah yang dijalankan masing-masing umat beragama berjalan dengan baik tanpa halangan atau gangguan dari umat yang berbeda agama.

5.2. Karakteristik Transformasi Industrial Komunitas Nelayan Desa Sei Apung Jaya

Perkembangan komunitas nelayan Desa Sei Apung Jaya dapat ditelusuri melalui beberapa perubahan dalam hal investasi, teknologi, dan manajemen. Perubahan tersebut dapat ditelusuri melalui dua kurun waktu yaitu, kurun waktu sebelum berlangsungnya modernisasi perikanan (*blue revolution*) dan kurun waktu sesudah berlangsungnya modernisasi perikanan (*blue revolution*). Pembagian kurun waktu tersebut dilakukan untuk dapat melihat transformasi industrial yang lebih jelas dalam perkembangan komunitas nelayan di Sei Apung Jaya. Percepatan transformasi industrial pada komunitas nelayan berlangsung sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah di sektor perikanan yang dikenal dengan modernisasi perikanan pada akhir 1970-an. Untuk sektor pertanian dikenal dengan istilah revolusi hijau (*green revolution*).

5.2.1. Investasi dan Transformasi Industrial Komunitas Nelayan

Sebelum berlangsungnya modernisasi perikanan, investasi pada komunitas nelayan di Sei Apung Jaya berjalan sangat lambat. Investasi nelayan hanya berlangsung pada alat tangkap ikan berupa sampan tradisional yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring kecil dan pancing. Dengan peralatan yang serba sederhana tersebut membuat hasil tangkapan tidak maksimal, karena nelayan tidak dapat melaut hingga ke tengah laut. Implikasinya, penghasilan nelayan juga hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (subsisten), sehingga sulit untuk berinvestasi.

Kapal tangkap ikan dengan ukuran yang lebih besar dan bermesin serta dilengkapi dengan jaring yang lebih besar dan rapat bukanlah dimiliki oleh komunitas nelayan yang ada di Sei Apung Jaya, melainkan milik nelayan pengusaha yang umumnya berasal dari etnik Cina. Jarak yang relatif dekat dengan Kota Tanjung Balai, membuat nelayan pengusaha yang berasal dari etnik Cina ini memilih berdiam di sekitar Kota Tersebut. Penduduk Desa Sei Apung Jaya hanya sebagai buruh pada kapal-kapal tersebut, itu pun pada umumnya adalah penduduk pendatang, bukan penduduk asli setempat. Penduduk asli setempat umumnya memilih untuk melakukan kegiatan penangkapan secara individual. Kalaupun ada yang berkelompok, paling banyak dua orang saja. Biasanya mereka masih termasuk kerabat atau bertetangga.

Pada kurun waktu tersebut, investasi pemerintah untuk pembangunan perikanan belum sampai ke tingkat nelayan, sementara itu pendapatan nelayan masih terbatas untuk kebutuhan subsistensi. Fenomena seperti ini sesungguhnya

tidak hanya terjadi di Desa Sei Apung Jaya, tetapi juga terjadi pada hampir setiap komunitas nelayan di tempat lain di Sumatera Utara.

Kurun waktu sebelum berlangsungnya modernisasi perikanan merupakan periode stagnasi dalam industri penangkapan ikan di Desa Sei Apung Jaya. Stagnasi ini ditandai dengan keadaan, dimana nelayan hanya memproduksi untuk memenuhi kebutuhan subsistensi, tidak tercipta surplus, sehingga tidak berlangsung investasi pada penangkapan ikan, baik pada perahu maupun jaring penangkap ikan di tengah laut. Bila dihubungkan dengan apa yang dikemukakan Rostow (1964) maka komunitas nelayan di Sei Apung Jaya masih berada pada tahap tradisional.

Investasi terhadap alat tangkap ikan berupa perahu dan jaring baru mulai berkembang pada akhir 1970-an dengan adanya kebijakan pemerintah di sektor perikanan berupa kebijakan modernisasi perikanan. Pemberian bantuan modal (kredit) kepada nelayan membuat beberapa nelayan, khususnya nelayan lapisan atas dapat berinvestasi dengan membeli kapal dalam ukuran yang lebih besar, yang dilengkapi dengan mesin dan jaring ikan yang lebih besar. Kelompok nelayan yang mendapat akses bantuan kredit ini adalah nelayan-nelayan sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik sehingga mereka memiliki barang yang dapat diagunkan sebagai sarat mendapatkan bantuan kredit tersebut. Karenanya, hanya sebagian kecil saja nelayan yang mampu mengakses bantuan modal tersebut. Dengan adanya kapal ukuran yang lebih besar dimiliki oleh komunitas nelayan di Sei Apung Jaya, maka mulailah muncul juragan-juragan kecil di desa tersebut yang memiliki beberapa anak buah (buruh nelayan) untuk dipekerjakan di

kapalnya. Sejalan dengan pengoperasian kapal-kapal berukuran lebih besar tersebut, terjadi peningkatan produksi nelayan pemilik Hal ini dimungkinkan karena kapal yang dilengkapi dengan mesin dan jaring yang lebih besar mampu berlayar hingga jauh ke laut sehingga memungkinkan tangkapan yang lebih banyak. Sejalan dengan meningkatnya hasil tangkapan, berkembang pula usaha pengeringan ikan (ikan asin). Hasil tangkapan yang melimpah, khususnya pada musim-musim tertentu tidak semua tertampung oleh pasar, sehingga sebagian dikeringkan sehingga lebih tahan lama. Usaha ini menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi isteri-isteri nelayan. Usaha pengeringan ikan bukan hanya berasal dari tangkapan komunitas nelayan di Sei Apung Jaya, tetapi juga hasil tangkapan juragan-juragan besar yang berasal dari luar desa tersebut. Untuk rnenghemat biaya pengolahan, juragan-juragan besar tersebut membuat industri pengeringan ikan di desa tersebut. Industri perikanan tersebut menciptakan peluang kerja bagi warga Desa Sei Apung Jaya, khususnya bagi para wanita.

Pada kurun waktu tersebut komunitas industri penangkapan ikan mulai melakukan investasi yang dengan itu produktivitas meningkat, surplus tercipta dan kelas pedagang muncul dalam komunitas. Dihubungkan dengan tahap perkembangan masyarakat dari teori Rostow (1964) tahapan ini analog dengan tahapan *pra take off* (pra tinggal landas). Tahap perkembangan ini dipengaruhi oleh investasi dalam perubahan teknologi tangkap ikan. Perubahan teknologi tangkap ikan ini sangat menentukan bagi berlangsungnya transformasi industrial pada komunitas nelayan.

Transformasi industrial penangkapan ikan yang berlangsung tidak signifikan diikuti oleh pengembangan usaha-usaha yang mendukung bagi industri perikanan tersebut, khususnya di Desa Sei Apung Jaya. Hal tersebut ditandai dari tidak munculnya usaha-usaha penjualan es dan penjualan Bahan Bakar Minyak (solar) untuk operasional kapal-kapal baru tersebut. Letak geografis yang dekat dengan Kota Tanjung Balai, dan perkembangan investasi yang tidak maksimal membuat kedua usaha itu menjadi tidak berkembang. Nelayan dapat langsung membeli ke ke galon minyak dan depot es yang tidak jauh jaraknya dari desa tersebut. Industri pengangkutan juga tidak berkembang karena sudah didominasi oleh para pengusaha etnik China. Di samping itu, belum ada penduduk desa yang mampu berinvestasi untuk itu.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi transformasi industrial penangkapan ikan di Desa Sei Apung Jaya dilihat dari investasi yang meningkat, namun hal itu hanya dinikmati sebagian orang saja. Sebagian lainnya, masih tetap mempertahankan alat tangkap tradisional berupa perahu layar. Kesenjangan kemampuan investasi dalam penangkapan ikan menciptakan kesenjangan yang semakin tajam antara nelayan pemilik dengan nelayan tradisional.

Investasi para pemodal luar dengan menggunakan alat tangkap trawl (pukat harimau) semakin mempersulit posisi nelayan tradisional. Hasil tangkapan semakin menurun akibat beroperasinya Pukat Harimau di daerah-daerah yang biasanya menjadi tempat nelayan tradisional beroperasi. Komunitas nelayan di Desa Sei Apung Jaya tidak dapat berbuat banyak karena Pukat Harimau tersebut

dimiliki oleh nelayan pengusaha dari luar desa mereka. Meskipun saat ini kapal tersebut dilarang beroperasi, namun menurut informan masih saja dilanggar oleh para pemilik kapal tersebut.

Kenaikan BBM yang terjadi akhir-akhir ini semakin mempersulit posisi nelayan yang menggunakan perahu dengan mesin tempel. Biaya operasional yang semakin tinggi, membutuhkan minimal Rp 200.000 s/d Rp 300.000 untuk sekali beroperasi membuat posisi nelayan semakin terjepit sehingga sulit untuk dapat berinvestasi. Hasil wawancara dengan informan menyebutkan, sekarang ini nelayan dalam posisi terjepit, minyak naik, hasil tangkapan sedikit, sehingga seringkali nelayan merugi. Banyak nelayan yang memarkirkan sampan tempelnya dan beralih pekerjaan menjadi nelayan tradisional kembali. Dengan sampan tanpa mesin, tidak perlu biaya operasional yang besar, walaupun hasilnya juga sangat minimum.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa terjadi fluktuasi transformasi industrial bila dilihat dari karakteristik investasi. Artinya, investasi komunitas nelayan Desa Sei Apung Jaya tidak berlangsung secara linier, tetapi ada kondisi dimana situasi stagnan terjadi kembali. Paling tidak bagi para nelayan kecil yang mulai bangkit usaha penangkapannya, yaitu dari penggunaan sampan tradisional menjadi perahu bermesin tempel dan kembali kepada sampan tradisional. Investasi dari pemerintah meskipun kuantitasnya besar, tidak berkontribusi langsung terhadap perkembangan yang terjadi, ia hanya berfungsi sebagai stimulan.

⁵ Besar biaya satu kali melaut tersebut dihitung berdasarkan harga Solar Rp 1.800,- per liter. Dengan kenaikan harga solar menjadi Rp 4.300,-.liter maka biaya operasional juga mengalami peningkatan mencapai 100 %.

Dari uraian di atas terlihat bahwa karakteristik transformasi industrial yang berlangsung dalam komunitas nelayan bila dilihat dari perkembangan investasi masih menunjukkan karakteristik yang bersifat dualitas, dimana sekelompok kecil komunitas mampu melakukan investasi untuk meningkatkan produktivitasnya, namun di sisi lain, sekelompok besar nelayan masih hidup dalam subsistensi, bahkan akhir-akhir ini, khususnya setelah kenaikan BBM justru kehidupan nelayan menjadi tidak aman subsistensi. Dengan demikian, sangat naif untuk dapat melakukan investasi. Program-program pemberdayaan masyarakat pesisir juga belum mampu mendorong dan meningkatkan kemampuan berinvestasi dari komunitas nelayan lapis bawah tersebut.

5.2.2. Teknologi dan Transformasi Industrial Komunitas Nelayan

Sebelum berlangsung kebijakan modernisasi perikanan, nelayan di Desa Sei Apung Jaya masih menggunakan alat tangkap sederhana secara individual. Kalaupun ada yang berkelompok, paling banyak dua orang. Mereka biasanya kerabat atau bertetangga. Nelayan masih menggunakan sampan tradisional tanpa layar atau yang dilengkapi dengan layar kecil, wilayah tangkapan tidak jauh dari pantai, dan produksinya masih sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Teknologi alat tangkap dimulai dengan penggunaan pancing, bubu, dan jala (jaring yang dilengkapi pemberat). Alat tangkap seperti ini hanya bisa dioperasikan pada wilayah laut yang tidak dalam. Meskipun teknologi alat tangkap ikan masih sederhana, namun nelayan tidak perlu khawatir untuk tidak mendapatkan hasil, meskipun hasilnya tidak maksimal. Hal ini disebabkan habitat

laut masin cukup baik sehingga ikan dapat berkembang biak dengan baik. Dengan demikian, jumlah ikan di laut masih cukup banyak, sehingga tidak mengalami kesulitan untuk menangkapnya meskipun dengan alat yang sederhana. Seperti dikemukakan oleh salah seorang informan, “dulu sewaktu alat tangkap masih sederhana, sangat mudah bagi nelayan untuk mendapatkan ikan, tidak perlu jauh-jauh dari pantai karena ikan masih banyak. Jarang terdengar nelayan yang pulang melaut tidak membawa hasil. Berbeda dengan sekarang, dimana teknologi penangkapan sudah semakin canggih, namun ikan semakin sedikit karena laut rusak sehingga ikan susah bertambah banyak. Sekarang sering terdengar nelayan pulang melaut tanpa membawa hasil seekor ikan pun, meskipun mereka sudah pergi jauh dari pantai. Jangankan dengan pancing, dengan jaring yang menggunakan perahu mesin tempel pun kadang-kadang nelayan pulang tanpa membawa ikan, kecuali kapal-kapal besar beroperasi di laut 1 - 2 minggu”.

Apa yang dikemukakan informan tersebut menggambarkan bagaimana sesungguhnya teknologi berpengaruh bagi berlangsungnya transformasi industrial pada komunitas nelayan. Transformasi industrial dalam bidang teknologi penangkapan ikan yang terus berlangsung ternyata tidak menyentuh semua lapisan komunitas nelayan. Bahkan ada sekelompok nelayan, yaitu kelompok nelayan yang tidak mampu mengikuti transformasi teknologi tersebut karena ketiadaan modal merasa sangat dirugikan. Mereka yang sebelum berlangsung transformasi industrial di bidang teknologi merasa aman subsistensinya, tetapi dengan terjadinya perkembangan teknologi penangkapan, justru mereka menjadi terancam keamanan subsistensinya. Sebaliknya, ada sekelompok kecil nelayan yang sangat

diuntungkan dengan kemajuan teknologi penangkapan tersebut, yaitu nelayan yang memiliki akses terhadap modal, karena mereka mampu membeli teknologi penangkapan yang modern.

Pengadopsian teknologi baru tersebut oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap modal berlangsung sekitar tahun 1980-an, dan umumnya berasal dari etnik Cina. Pada kurun waktu tersebut, berkembang pula teknologi penangkapan dengan sistem jermal, yaitu dengan membangun suatu tempat di tengah laut dengan cara memancang kayu-kayu besar ke laut, sehingga tempat tersebut tidak tenggelam terkena ombak. Diperlukan biaya yang sangat mahal untuk membuat suatu jermal. Dewasa ini, untuk membangun satu jermal dibutuhkan dana mencapai Rp 300,- juta. Dengan teknologi jermal ini, maka pemilik jermal dapat mempekerjakan beberapa orang buruh di sana, yang tinggal selama berbulan-bulan. Dengan teknologi jermal ini, penangkapan ikan bisa dilakukan setiap saat, yaitu dengan memasang jaring dan memancing. Sebagian hasil tangkapan dijual, dan sebagian lagi dikeringkan. Yang mampu memiliki jermal ini adalah juragan-juragan besar, karena diperlukan modal yang sangat besar. Ironisnya, tak satupun warga di Desa Sei Apung Jaya yang menjadi pemilik jermal ini. Pekerja di jermal biasanya juga orang luar, bahkan disebutkan beberapa orang yang dipekerjakan di sana adalah anak-anak. Anak-anak ini dieksploitasi sedemikian rupa dengan gaji yang amat rendah namun bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas. Pekerja anak-anak ini tidak dapat berbuat apa-apa karena berada di tengah laut. Pekerja anak di jermal ini dikenal dengan istilah “anak jermal”.

Teknologi penangkapan dengan menggunakan kapal-kapal besar dan jermal ini mungkin untuk dilakukan dengan dukungan hadirnya pabrik es (es balok). Es balok mendorong berkembangnya pemasaran dari tangkapan yang semakin banyak tersebut, karena ikan dapat diangkut dengan truk dalam waktu lama sehingga pemasaran menjadi meluas, dengan cara itu re akumulasi modal terus berjalan. Dalam periode 1980-an dan 1990-an adopsi teknologi terus berjalan. Adopsi teknologi telah mendorong produktivitas sangat tinggi, dengan itu inovasi dalam perlengkapan perahu dan perlengkapan-perengkapan lainnya dikembangkan sendiri oleh individu tertentu dalam komunitas. Dengan demikian, berlangsung pula diversifikasi pekerjaan pada komunitas nelayan, dimana muncul pekerjaan-pekerjaan lain yang mendukung bagi perkembangan teknologi penangkapan tersebut.

Bila dilihat melalui perkembangan teknologi sebagaimana dikemukakan di atas, maka karakteristik transformasi industrial yang berlangsung dalam komunitas nelayan di Desa Sei Apung Jaya juga masih berciri transisi dualitas. Artinya di satu sisi ada komunitas nelayan yang sudah mampu melakukan adopsi teknologi penangkapan yang lebih modern dari yang tradisional, di sisi lain masih terdapat sekelompok komunitas nelayan yang tetap menggunakan perahu dan alat tangkap tradisional seperti pancing. Meskipun komunitas yang terakhir ini sudah sedikit jumlahnya. Kecenderungannya, telah terjadi perkembangan dalam hal teknologi penangkapan dengan menggunakan sampan bermesin tempel dan penggunaan jaring. Dengan kenaikan BBM yang sangat tinggi, maka akan berpengaruh pula pada karakteristik transformasi industrial yang berlangsung di Sei Apung Jaya,

apakah masih cenderung pada karakteristik transisi dualitas menuju ke modern, atau sebaliknya justru beralih kembali ke cara tradisional.

5.2.3. Manajemen dan Transformasi Industrial Komunitas Nelayan

Perkembangan organisasi produksi pada komunitas nelayan yang dicirikan oleh perubahan dari usaha individu yang terikat pada rumah tangga ke usaha kelompok yang terpisah dari rumah tangga. Sebelum berlangsungnya modernisasi perikanan (sebelum tahun 1970-an), ketika teknologi pancing, jala dan bubu masih dominan, penangkapan adalah usaha individu. Setelah kapal bermesin dan jermal dioperasikan, penangkapan adalah usaha yang terorganisir.

Pada perahu-perahu bermesin tempel, ukuran organisasi berkisar 3 hingga 5 orang. Pemilik perahu sekaligus sebagai pimpinan operasi penangkapan. Bila memiliki lebih dari satu unit penangkapan, pemilik tetap memimpin satu unit dan unit lainnya diserahkan kepada orang yang dipercaya sebagai pemimpin. Biasanya masih dalam golongan kerabat. Pada tahap ini mulailah dikenal hubungan toke – anak buah (meminjam istilah Scott, patron - klien). Pemilik perahu disebut toke (patron) dan sedangkan nelayan yang turut serta disebut anak buah (klien).

Untuk kapal-kapal berukuran lebih besar, ukuran organisasi berkisar antara 10 - 20 orang. Pada awalnya, pemilik berposisi sekaligus sebagai pemimpin penangkapan. Namun dewasa ini terjadi pergeseran dimana pelaut umumnya tidak turut lagi melaut. Pemilik lebih banyak berkonsentrasi di darat untuk mengurus perbekalan para anak buah dan pemasaran ikan. Penangkapan dipimpin oleh seseorang yang disebut nakhoda kapal dan dibantu oleh seorang tekong sebagai

penunjuk jalan ke arah mana diduga banyak ikannya. Seringkali nakhoda juga sekaligus menjadi tekong. Di samping itu, dalam rombongan turut serta seorang mekanik dan beberapa orang yang bertugas untuk menangkap ikan dan menyiapkan makanan. Sekali melaut biasanya mereka menghabiskan waktu 1 - 2 minggu. Hal itu tergantung pada volume tangkapan yang sudah diperoleh.

Bila pemilik tidak turut serta melaut, maka kepercayaan penuh jatuh kepada nakhoda kapal. Segala keputusan diambil dan ditetapkan oleh sang nakhoda. Anak buah (klien) direkrut dari masyarakat setempat, tetapi seringkali tidak mencukupi sehingga didatangkan dari desa tetangga. Sering pula para pendatang yang mencari pekerjaan ke desa tersebut direkrut menjadi anak buah.

Manajemen waktu penangkapan juga mengalami perkembangan. Ketika menggunakan sampan tradisional, penangkapan hanya memerlukan waktu satu hari atau satu malam, sehingga tidak dibutuhkan es balok untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan. Ketika menggunakan kapal berukuran besar, kegiatan penangkapan dikelola per trip. Untuk rencana perjalanan penangkapan ikan ke tengah laut, perlengkapan yang diperlukan, seperti solar, es balok, beras, kopi, gula, dan rokok, serta kelengkapan lainnya dilakukan oleh seorang pekerja khusus yang ditunjuk oleh pemilik kapal. Untuk membersihkan dan merawat kapal juga dilakukan oleh orang khusus yang dipekerjakan untuk itu.

Pembagian hasil tangkapan dilakukan dengan sistem bagi hasil dan sistem upah. Dalam sistem bagi hasil, pendapatan buruh sangat ditentukan oleh

⁶ Mekanik adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam permesinan kapal. Mekanik bertugas untuk merawat mesin kapal, sehingga terhindar dari kerusakan, dan mampu melakukan perbaikan bila seandainya terjadi kerusakan pada kapal tersebut.

banyaknya hasil tangkapan. Bila hasil tangkapan banyak, maka penghasilan mereka akan meningkat, sebaliknya bila hasil tangkapan sedikit maka penghasilan juga akan menurun. Sedangkan dengan sistem upah, penghasilan buruh tetap, baik ketika hasil tangkapan melimpah maupun sedikit. Kebanyakan pemilik kapal lebih memilih sistem bagi hasil daripada sistem upah.

Manajemen pemasaran berkembang seiring meningkatnya hasil tangkapan. Sebelum berlangsungnya modernisasi perikanan, tangkapan lebih banyak untuk konsumsi, sisanya dijual ke pasar lokal. Ketika teknologi penangkapan semakin modern yang diikuti oleh peningkatan produksi, maka muncullah kelompok pedagang yang membeli ikan hasil tangkapan nelayan. Dengan demikian muncullah toke-toke baru yang berperan membeli ikan hasil tangkapan nelayan dan memasarkannya ke pasar-pasar lokal dan regional.

Uraian di atas menggambarkan bahwa karakteristik transformasi industrial komunitas nelayan di Desa Sei Apung Jaya dalam hal manajemen telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, dari manajemen individual menjadi manajemen kelompok.

Transformasi industrial yang berlangsung pada komunitas nelayan yang disoroti melalui tiga variabel (investasi, teknologi, dan manajemen) bukanlah sesuatu yang terpisah satu dengan yang lain, melainkan terdapat hubungan kausalitas. Artinya, perubahan yang terjadi pada satu variabel juga akan mempengaruhi pada variabel yang lainnya.

5.3. Transformasi Ikatan Patron-Klien (Toke-Anak Buah) Dalam Komunitas Nelayan Desa Sei Apung Jaya:

Sebagai suatu komunitas, masyarakat nelayan memiliki beraneka ragam kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tercermin dalam tungsi-fungsi yang ada dalam masyarakat. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dibentuklah suatu lembaga atau beberapa lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena itu, semakin banyak kebutuhan suatu masyarakat maka akan semakin banyak pula lembaga yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan tersebut. Keadaan tersebut juga mencerminkan terjadinya transformasi sosial budaya di dalam masyarakat.

Teori diferensiasi sosial menyatakan bahwa perubahan sosial (termasuk transformasi sosial), menuju masyarakat modern ditentukan oleh pembagian kerja dan diferensiasi sosial yang di dalamnya terjadi pergeseran solidaritas sosial (Durkheim, 1964). Secara horizontal, diferensiasi sosial terjadi dalam bentuk munculnya fungsi baru dan lembaga baru dalam masyarakat (Smelser, 1964) dan secara vertikal diferensiasi sosial terjadi dalam bentuk stratifikasi sosial berdasarkan keahlian dan pendapatan (Lensky, 1964: Grusky, 1994). Pada masyarakat nelayan di Desa Sei Apung Jaya, transformasi kelembagaan patronklien juga berlangsung.

Fenomena kelembagaan sosial-ekonomi patron-klien merupakan hal yang umum ditemukan pada masyarakat agraris (baik pertanian maupun maritim). Sebagaimana dikemukakan salah seorang informan (Kepala Desa), kelembagaan patron-klien merupakan kelembagaan sosial-ekonomi yang dominan masih hidup di tengah-tengah komunitas nelayan, meskipun telah mengalami pergeseran dalam

pelaksanaan hubungan-hubungan tersebut. Resistensi (kebetahanan) kelembagaan patron-klien di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat nelayan⁷, menunjukkan bahwa kelembagaan patron-klien masih berfungsi sentral di tengah-tengah kemajuan masyarakat.

Meskipun sudah cukup banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelembagaan patron-klien bersifat eksploitatif; namun kelembagaan tersebut tetap bertahan. Ini menunjukkan bahwa kelembagaan patron-klien bersifat eksploitatif adalah dari perspektif si peneliti, sedangkan dari pandangan klien sendiri tidaklah selalu demikian. Menurut informan yang pernah menjadi klien, patron (tauke) tidaklah eksploitatif terhadap mereka. Kalaupun ada klien (anak buah) yang merasa dieksploitasi, tetapi klien tetap merasa bahwa mereka juga mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak mereka dapatkan dan pihak lain selain patron (tauke). Lebih lanjut informan tersebut mengatakan bahwa bekerja dengan tauke ada untung dan ada ruginya. Namun saat ini mereka memilih menjadi nelayan tradisional dengan alasan bahwa mereka bisa lebih bebas dan tidak terlalu terikat dengan keharusan melaut, apa lagi saat ini keadaan keamanan nelayan yang tidak terjamin dari perompakan khususnya bila mereka melalui ke daerah perbatasan dengan Propinsi Aceh. Ketidakamanan melaut juga dipicu oleh otonomi daerah yang belum jelas terutama berkaitan dengan batas-batas lautan untuk masing-masing daerah. Ada nelayan dari suatu daerah tertentu yang mengklaim bahwa daerah tersebut adalah daerah penangkapan yang masuk dalam wilayahnya sehingga orang dari daerah lain yang menangkap ikan ke daerah tersebut tidak

⁷Kajian tentang kelembagaan patron-klien ini dapat dilihat pada hasil penelitian Ahimsa (1991); Sallatang (1976); Yusmar (1994); Zulkifli (1992).

mereka jamin keselamatannya. Konflik antar nelayan seperti ini membuat nelayan menjadi takut untuk melaut. Ini merupakan salah satu alasan mereka untuk memilih menjadi nelayan tradisional dari pada sebagai nelayan buruh. Menurut mereka, nelayan buruh baru bisa tidak melaut bila mendapat izin dari tauke.

Meskipun dalam melaut nelayan tradisional tidak memiliki patron atau tauke, namun nelayan tradisional ini tetap terkait dengan kelembagaan patron klien dalam hal menjual hasil tangkapan ikan. Meskipun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ditemui di lokasi penelitian tetapi sebagian nelayan tradisional tidak menjualnya ke TPI melainkan kepada seorang pemborong ikan (tauke) yang datang dari luar daerah. Alasan mereka untuk menjual ikan hasil tangkapan kepada tauke bukanlah semata-mata persoalan harga tetapi adanya jaminan keuangan (ekonomi) yang dapat diberikan tauke bila musim paceklik tiba, atau pada saat-saat nelayan tidak bisa melaut (akibat gangguan cuaca, sakit, dan sebagainya), atau juga pada saat nelayan membutuhkan uang untuk membeli peralatan menangkap ikan seperti jaring misalnya.

Kelembagaan sosial-ekonomi “patron-klien” merupakan hubungan khusus yang seharusnya hanya ditemukan pada masyarakat tradisional. Kenyataan menunjukkan bahwa kelembagaan patron-klien ini tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat tradisional, tetapi juga ditemui pada masyarakat modern.

Menurut Eisentadt dan Roniger (1984:220), kelembagaan patron-klien ini dapat terjadi melalui hubungan antara: (1) petani dengan buruh tani dalam

konteks struktur penguasaan tanah; (2) pelepas uang dengan peminjam dalam konteks penguasaan sumber modal; (3) pengusaha, pedagang, dan profesional di satu pihak dengan orang desa di pihak lain dalam konteks hubungan dagang atau akses informasi khusus; (4) antara politisi dengan rakyat dalam konteks perolehan suara dalam pemilihan umum; (5) antara birokrat dengan warga negara dalam konteks pengurusan Surat resmi atau bantuan pemerintah.

Dalam konteks komunitas nelayan, kelembagaan patron-klien yang ada dapat terjadi melalui hubungan antara: pengusaha (pemilik kapal) dengan nelayan buruh; pedagang ikan dengan nelayan; dan pelepas uang dengan nelayan. Dalam kelembagaan patron-klien ini terjadi hubungan yang vertikal akibat perbedaan-perbedaan status yang dimiliki antara patron dan klien. Hubungan yang vertikal akibat perbedaan status (kelas) selalu menimbulkan hubungan pertukaran yang eksploitatif terhadap klien. Seharusnya hubungan yang eksploitatif tidak akan bertahan (resisten) di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat nelayan jika ada kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu menggantikan kelembagaan patron-klien tersebut.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan, kelembagaan sosial-ekonomi “koperasi” yang berciri organisasi modern seharusnya mampu menggantikan peran kelembagaan patron-klien yang eksploitatif tersebut. Kenyataan memperlihatkan bahwa kelembagaan sosial ekonomi koperasi tidak mampu menjalankan fungsi tersebut, bahkan koperasi sepertinya kalah bersaing dengan kelembagaan patron-klien. Keadaan yang seperti

ini juga terjadi pada masyarakat komunitas nelayan yang ada di Desa Sei Apung Jaya.

Hubungan patron-klien pada komunitas nelayan terbentuk ketika penangkapan secara individual berubah menjadi penangkapan secara berkelompok. Hubungan patron-klien ini terbentuk bersamaan dengan transformasi yang berlangsung pada teknologi penangkapan ikan dari teknologi dengan menggunakan sampan kecil menjadi teknologi dengan kapal yang dilengkapi dengan alat tangkap berskala besar. Pergeseran penggunaan alat tangkap tersebut diikuti oleh pergeseran dalam struktur hubungan patron-klien (tauke-anak buah).

Ketika alat tangkap masih menggunakan perahu yang dilengkapi mesin tempel ukuran kecil, jumlah nelayan yang ikut dalam perahu tersebut hanya berkisar 4-5) orang saja. Pemilik perahu (modal) biasanya sekaligus berperan sebagai patron dan turut melaut bersama anak buahnya (klien). Ketika perahu tempel digantikan dengan kapal tonase besar, dimana dalam satu kapal sudah membutuhkan 10-20 orang nelayan, maka yang bertindak sebagai patron adalah pemiliki modal yang seringkali tidak turut lagi melaut bersama anak buahnya. Untuk memimpin penangkapan ikan di laut diserahkan kepada nakhoda kapal, yang dibantu oleh beberapa orang yang juga memiliki pembagian tugas masing-masing. Pembagian tugas juga mengikuti garis hirarkis dan berpengaruh terhadap besarnya upah yang diterima.

Kalau dalam penangkapan dengan perahu kecil hanya ada ikatan patronklien, namun dalam penangkapan yang menggunakan kapal tonase besar, telah

muncul “patron kecil”, yaitu nakhoda kapal yang diserahi tugas oleh pemilik modal (patron besar). Dengan demikian, nakhoda kapal (pimpinan penangkapan) berperan sebagai klien dalam hubungannya dengan pemilik modal, namun berperan pula sebagai “patron kecil” dalam hubungannya dengan klien (anak buah) lainnya dalam penangkapan ikan. Ketergantungan “patron kecil” terhadap patron (tauke) semakin kecil bila dibandingkan dengan anak buah yang lainnya. Sebagaimana dikemukakan salah seorang informan,

“Sejalan dengan kehadiran kapal tonase besar, muncul pula nelayan-nelayan kaya baru yang memiliki keahlian dalam melaut, seperti nelayan yang memiliki keahlian sebagai juru mudi kapal dan yang memiliki pengetahuan tentang tempat-tempat yang memiliki banyak ikan (tekong). Mereka ini mendapatkan gaji yang cukup besar karena sudah dipercaya oleh tauke sebagai pemimpin penangkapan”.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa transformasi industrial yang berlangsung dalam komunitas nelayan di Desa Sei Apung Jaya telah membawa dampak bagi berlangsungnya pula transformasi ikatan patron-klien dalam komunitas tersebut.

5.4. Transformasi Ikatan Patron-Klien dan Berlangsungnya Diferensiasi Sosial, Komersialisasi Ekonomi dan Peran Negara

Hubungan dalam kelembagaan patron-klien itu menurut Scott (1972:92) memiliki ciri-ciri: (1) Terdapatnya ketidaksamaan dalam pertukaran (*inequality of exchange*) yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan. Klien adalah seseorang yang masuk dalam hubungan pertukaran tidak seimbang, dimana ia tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian patron, hutang kewajiban mengikatnya dan bergantung pada patron; (2) Adanya sifat

tatap muka (*face to face character*), walaupun hubungan ini bersifat instrumental dimana kedua pihak memperhitungkan untung rugi, namun unsur rasa tetap berpengaruh karena adanya kedekatan hubungan; (3) Ikatan ini bersifat luwes dan meluas (*diffuse flexibility*), sifat meluas terlihat pada tidak terbatasnya hubungar pada hubungan kerja saja, melainkan juga hubungan pertetangaan, kedekatan secara turun temurun atau persahabatan di masa lalu, selain itu juga terlihat pada jenis pertukaran yang tidak melulu uang atau barang tetapi juga bantuan tenaga dan dukungan kekuatan. Dari beberapa ciri yang dikemukakan oleh Scott tersebut dapat membantu kita untuk melihat bagaimana bentuk transformasi ikatan patron-klien di tengah terjadinya diferensiasi sosial, komersialisasi ekonomi, dan adanya peran negara.

5.4.1. Terjadinya Ketimpangan Pemilikan Kekayaan

Hasil penelitian ini menemukan bahwa hubungan kelembagaan patron-klien sebagaimana dicirikan oleh Scott tersebut juga ditemui di Desa Sei Apung Jaya, walaupun tidak sepenuhnya memiliki ciri yang sama. Menurut hasil pengamatan peneliti dan hasil wawancara dengan informan bahwa ciri pertama dari kelembagaan patron-klien di Desa Sei Apung Jaya adalah terdapatnya ketidaksamaan dalam pertukaran (*inequality of exchange*) yang menggambarkan perbedaan lebih dalam kekayaan dari pada kekuasaan dan kedudukan. Kerniskinan yang dialami oleh nelayan (nelayan buruh) memaksa mereka untuk menjalin hubungan dalam kelembagaan patron-klien dengan orang-orang kaya

(yang memiliki perahu tonase besar dan pedagang pengumpul ikan), baik yang berasal dari Desa Sei Apung Jaya maupun yang berasal dari luar desa tersebut.

Perbedaan dalam hal kekayaan akhirnya membentuk pula perbedaan dalam hal kekuasaan dan kedudukan. Patron, dalam kelembagaan patron-klien, karena kekayaan yang dimilikinya menempatkannya pada kedudukan posisi atas dalam hubungan hirarki secara vertikal. Dan karena kedudukannya itu pula akhirnya sang patron memiliki kekuasaan yang lebih tinggi atas kliennya.

Ciri kedua dari hubungan kelembagaan patron-klien, adanya sifat tatap muka (*face to face character*), menurut hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan informan telah mengalami kemerosotan. Hubungan instrumental yang memperhitungkan untung rugi semakin menguat, sedangkan unsur “rasa” sebagai kedekatan hubungan semakin hilang. Menurut salah seorang informan,

“menguatnya hubungan instrumental yang memperhitungkan untung rugi dalam kelembagaan patron-klien disebabkan semakin sentralnya peran patron (tauke) sebagai pemilik kekayaan (modal) dan semakin memburuknya kehidupan ekonomi masyarakat nelayan. Keadaan ini menyebabkan patron mudah mencari atau mendapatkan orang yang mau bekerja sebagai nelayan buruh dalam menangkap ikan dan sifat materialistis (keserakahan) patron yang semakin kuat”. Sifat ‘keserakahan’ patron mengurangi (kalau tidak menghilangkan) ‘rasa sosial’-nya kepada klien (buruhnya). Hilangnya rasa sosial ini juga disebabkan oleh mudahnya kedekatan hubungan antara patron dan klien akibat semakin jaranginya pertemuan tatap muka antara patron dan klien. Patron (pemilik perahu tonase besar) sudah jarang (bahkan tidak ada lagi) yang ikut melaut. Patron (tauke) hanya menunggu hasil tangkapan buruhnya di darat. Kedekatan hubungan ini juga semakin merenggang, karena sebagian dari patron (tauke) tidak bertempat tinggal di Desa Sei Apung Jaya, melainkan di luar desa tersebut. Jaraknya yang relatif dekat dengan Kota Tanjung Balai, membuat para patron memilih tinggal di kota yang memiliki berbagai fasilitas lebih bila dibandingkan dengan di Desa Sei Apung Jaya.

Informasi yang diperoleh dari informan penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung telah terjadi jurang sosial ekonomi yang semakin

tajam antara patron dan klien. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan patron-klien yang terjadi di Desa Sei Apung Jaya lebih dominan berciri hubungan instrumental yang memperhitungkan untung rugi dan kurang mempertimbangkan aspek “rasa” sosial. Ini menunjukkan bahwa diferensiasi sosial dan komersialisasi ekonomi yang berlangsung telah menggeser ikatan patron-klien dari yang berciri “hubungan instrumental kedekatan hubungan” menjadi “hubungan instrumental *an rich*”

Semakin kuatnya peran negara, khususnya membcrikan perlindungan bagi warganya, juga telah mempengaruhi ikatan patron-klien yang didasarkan pada kedekatan hubungan menjadi ikatan yang semata-mata didasarkan pada untung rugi. Patron tidak lagi memerlukan perlindungan dari kliennya terhadap gangguan keamanan yang rnengancam dirinya, tetapi lebih memilih perlindungan keamanan yang sudah disediakan oleh negara (POLRI dan TNI).

Ketergantungan ekonomi nelayan (klien) terhadap patron sungguh sangat disadari oleh para klien. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan,

“Saya mengetahui bahwa harga jenis ikan yang saya tangkap dari laut akan lebih mahal harganya bila saya jual kepada pedagang lain, tetapi saya sudah termakan hutang dengan tauke saya. Saya pernah meminjam sejumlah uang kepada tauke untuk sesuatu keperluan yang mendesak, maka sudah sepantasnyalah kalau saya menjual ikan yang saya peroleh kepada tauke tersebut meskipun harganya lebih murah dari harga pasaran”.

Apa yang dinyatakan oleh informan tersebut rnemperlihatkan begitu kuatnya ketergantungan ekonomi nelayan tersebut terhadap patron. Di samping klien bisa rnernperoleh pinjaman dari sang tauke bila ada kebutuhan yang

mendesak, prosedur peminjaman juga tidak berbelit-belit (tanpa prosedur administrasi) dan tanpa perlu menyediakan ‘agunan’ sebagaimana halnya bila ingin meminjam di lembaga formal seperti bank misalnya. Untuk meminjam sejumlah uang, klien cukup berkunjung ke rumah tauke (patron) dan menceritakan keadaannya, sang patron biasanya dengan mudah memberikan pinjaman uang secukupnya. Hal-hal seperti ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan kelembagaan sosial-ekonomi patron-klien tetap eksis (bertahan) di tengah-tengah komunitas nelayan Desa Sei Apung Jaya.

5.4.2. Hubungan Yang Bersifat Luwes dan Meluas (*Diffuse Flexibility*)

Ciri kedua dari hubungan kelembagaan patron-klien menurut Scott, yaitu ikatan yang bersifat luwes dan meluas (*diffuse flexibility*), juga tidak sepenuhnya terpresentasikan di Desa Sei Apung Jaya. Hubungan patron-klien yang didasarkan pada hubungan pertetanggaan, kedekatan secara turun-temurun, dan persahabatan di masa lalu tidak banyak ditemui di desa ini. Hubungan cenderung terbatas pada hubungan kerja saja. Kalaupun ada hubungan pertukaran di luar kerja biasanya selalu dinilai dengan uang. Patron biasanya memberi sejumlah uang kepada kliennya bila ia membutuhkan bantuan tenaga untuk sesuatu keperluan. Ini menunjukkan bahwa hubungan-hubungan sosial patron-klien di Desa Sei Apung Jaya telah mengalami kemerosotan. Hubungan-hubungan yang terjadi antara patron dengan klien cenderung didasarkan atas pertimbangan ekonomi daripada pertimbangan sosial (bandingkan dengan Salman, 1997).

Keadaan di atas kembali memberi petunjuk kepada kita bahwa kondisi ekonomi nelayanlah yang melanggengkan hubungan kelembagaan patron-klien. Meskipun hubungan-hubungan sosial dari patron-klien telah mengalami kemerosotan (meskipun tidak hilang sama sekali) namun ketergantungan ekonomi membuat mereka tidak dapat melepaskan diri dari kelembagaan patron-klien.

Beberapa kelembagaan sosial-ekonomi lainnya, ternyata tidak cukup mampu untuk mengatasi “ketidakpastian ekonomi” nelayan (nelayan buruh dan nelayan tradisional). Bahkan kelembagaan lain (seperti “Bakri”⁸; “koperasi”) menurut informan lebih eksploitatif dari kelembagaan patron-klien. Pengalaman salah seorang informan yang pernah terlibat dengan “bakri” (batak kredit) mengatakan bahwa “bakri jauh lebih mencekik leher ketimbang tauke (patron). Dari segi agama meminjam uang dengan bunga juga haram hukumnya”.

Menurut Scott (1972), hubungan kelembagaan patron-klien akan merosot bila: (1) diferensiasi sosial semakin tajam sehingga sumber-sumber ketergantungan dan perlindungan klien semakin beragam, dengan demikian tercipta lebih banyak hubungan vertikal dengan kualitas masing-masing yang lebih lemah; (2) Terjadinya komersialisasi ekonomi sehingga terbuka sumber pendapatan baru yang memungkinkan ketergantungan klien kepada patron berkurang; (3) Menguatnya peranan negara sehingga di satu sisi keamanan klien lebih terjamin dan di sisi lain posisi patron tertekan, dengan demikian perhatiannya pada klien semakin berkurang.

⁸ “Bakri” merupakan istilah/julukan yang diberi oleh masyarakat terhadap institusi/individu yang berprofesi meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dari rumah ke rumah. Kebetulan yang banyak terlibat dalam profesi ini adalah Suku Batak maka muncullah istilah “Bakri” yang merupakan akronim dari “Batak Kredit”.

5.4.2.1. Diferensiasi Sosial dan Transformasi Ikatan Patron - Klien

Prasyarat yang dikemukakan Scott agar hubungan kelembagaan patronklien dapat merosot, tidak sepenuhnya ditemui di Desa Sei Apung Jaya.. Hal ini juga merupakan salah satu faktor kenapa kelembagaan sosial-ekonomi patron-klien masih tetap eksis dan cenderung bertahan (resisten) di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun terjadi diferensiasi sosial pada masyarakat Desa Sei Apung Jaya, tetapi belum cukup mampu untuk menggantikan fungsi dan lembaga lama (patron-klien). Bahkan yang terjadi adalah de-diferensiasi sebagai proses balik dari diferensiasi (lihat Halerkamp dan Smelser 1992:11). Menurut teori diferensiasi sosial, seharusnya kebutuhan baru direspons oleh munculnya lembaga baru yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan baru tersebut. Lembaga baru tersebut seharusnya dijalankan oleh suatu kelompok yang baru pula dari masyarakat. Hasil wawancara dengan informan dan salah seorang tauke dapat diketahui bahwa kebutuhan baru tersebut ternyata tidak direspons oleh munculnya kelembagaan baru dengan kelompok baru tetapi kebutuhan baru itu direspons oleh kelompok yang telah ada dalam masyarakat. Penelitian ini menemukan salah satu kasus tentang terjadinya de-diferensiasi tersebut sebagai berikut:

“kelembagaan tauke-nelayan buruh dengan hasil tangkapannya memerlukan alat transportasi untuk mengangkut ikan yang diperoleh ke pasar. Menurut teori diferensiasi seharusnya muncul lembaga baru dari kelompok baru untuk menjalankan fungsi transportasi tersebut. Kenyataannya, fungsi baru itu tetap dijalankan oleh kelompok yang tauke juga. Dengan kata lain yang menyediakan alat transportasi adalah tauke dari nelayan buruh juga. Ini menunjukkan bahwa pembagian kerja sebagai ciri dari diferensiasi sosial tidak berjalan secara sempurna”.

Kasus tersebut dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah “monopoli”. Keadaan ini menyebabkan kelembagaan patron-klien tetap eksis (bertahan) dengan kecenderungan kedudukan patron yang semakin kuat karena mampu mengakumulasi semua sumber ekonomi yang ada di Desa Sei Apung Jaya. Terjadinya proses de-diferensiasi tersebut menyebabkan tidak terjadinya keberagaman sumber-sumber ketergantungan dan perlindungan klien di Desa Sei Apung Jaya sebagai prasyarat terjadinya kemerosotan kelembagaan patron-klien.

Diferensiasi sosial hanya mampu menggeser ikatan patron-klien, dari ikatan patron-klien yang bersitat langsung menjadi ikatan patron-klien yang bersifat tidak langsung. Ketika belum terjadi diferensiasi sosial, klien dapat langsung berhubungan dengan patron ketika ada suatu keperluan (meminjam uang misalnya), namun sekarang, klien tidak dapat langsung berhubungan dengan patron tetapi harus melalui perantara (nakhoda kapal/pemimpin penangkapan) yang sudah dipercaya oleh patron (pemilik kapal). Klien baru akan diberi pinjaman uang oleh patron apabila mendapat persetujuan atau rekomendasi oleh sang nakhoda/pemimpin penangkapan. Dengan demikian, berlangsungnya diferensiasi sosial telah merubah bentuk-bentuk ikatan patron-klien yang berlangsung selama ini.

5.4.2.2. Komersialisasi Ekonomi dan Transformasi Ikatan Patron-Klien

Komersialisasi ekonomi sebagai prasyarat lain agar terjadi kemerosotan kelembagaan patron-klien memang tengah berlangsung di Desa Sei Apung Jaya. Hal ini dapat dilihat dari munculnya usaha-usaha baru seperti rumah makan.

Berdirinya beberapa rumah makan yang menyediakan “sea food” di Desa Sei Apung Jaya untuk memenuhi konsumen yang datang untuk rekreasi membuat penjualan hasil tangkapan untuk jenis ikan tertentu, udang, kepiting, curni-cumi, dan kerang lebih mudah terjual dan dengan harga yang relatif lebih tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sebagian dari pengunjung yang datang ke ada yang langsung membeli ikan dari nelayan. Ini membuat harga ikan menjadi relatif lebih mahal dari pada nelayan menjualnya kepada pedagang pengumpul atau melalui TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Komersialisasi ekonomi juga terjadi pada proses pengeringan ikan (ikan asin). Pengeringan ikan ini juga menambah sumber penghasilan bagi rumah tangga nelayan khususnya dari kaum perempuan. Ibu rumah tangga dan juga anak-anak perempuannya meluangkan waktunya untuk bekerja mengeringkan ikan untuk menambah sumber pendapatan rumah tangga mereka.

Munculnya industri-industri pengolahan ikan untuk tujuan ekspor di sekitar Desa Sei apung Jaya juga telah mengurangi ketergantungan komunitas nelayan dari pekerjaan hanya sebagai nelayan. Pekerjaan di industri pengolahan ikan ini umumnya dilakukan oleh perempuan dan remaja.

Meskipun komersialisasi ekonomi terjadi di Desa Sei Apung Jaya, tetapi belum mampu merubah hubungan patron-klien secara signifikan. Hal ini disebabkan komersialisasi ekonomi yang terjadi masih berjalan di tempat. Dengan kata lain, komersialisasi ekonomi yang tumbuh belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat nelayan secara keseluruhan. Hal ini juga menjadi salah satu

faktor yang menyebabkan kelembagaan patron-klien tetap eksis (bertahan) di tengah-tengah masyarakat Desa Sei Apung Jaya.

5.4.2.3. Peran Negara di Tingkat Lokal dan Transformasi Ikatan Patron-Klien

Peran negara yang semakin kuat sebagai prasyarat ketiga bagi merosotnya hubungan kelembagaan patron-klien juga tidak signifikan terjadi di Desa Sei Apung Jaya. Penguatan peran negara hanya terjadi di tingkat regional dan nasional, sedangkan di tingkat lokal peran negara hanya memperkuat kedudukan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat peranannya di tingkat lokal ternyata banyak disalahgunakan oleh aparat desa. Hal ini dapat diketahui dari beberapa program bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah pada Desa Sei Apung Jaya.

Sebagaimana kita ketahui, sejak krisis ekonomi melanda bangsa kita yang diawali dengan krisis moneter sejak pertengahan 1997, beragam bantuan ditujukan kepada golongan masyarakat miskin dalam program JPS. Ternyata bantuan yang diberikan pemerintah tidak sepenuhnya sampai kepada sasaran atau istilah pemerintah “tidak tepat sasaran”.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa prasyarat penguatan peran negara di tingkat lokal (Desa Sei Apung Jaya) untuk menjamin keamanan klien tidak terjadi. Ini berarti bahwa peran patron masih tetap kuat pada masyarakat tersebut, yang berarti pula merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelembagaan sosial-ekonomi patron-klien tetap eksis (bertahan) di tengah-tengah masyarakat Desa Sei Apung Jaya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6. 1. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Perkembangan investasi, teknologi, dan manajemen berpengaruh terhadap berlangsungnya transformasi industrial pada komunitas nelayan. Perkembangan investasi memungkinkan nelayan untuk membeli kapal dan teknologi tangkap ikan yang lebih modern sehingga volume hasil tangkapan meningkat. Namun perkembangan tersebut tidak diikuti oleh berkembangnya usaha-usaha lain yang mendukung bagi industri perikanan tersebut, khususnya di Desa Sei Apung Jaya. Transformasi industrial yang berlangsung juga bias pada individu pemilik modal. Dengan kata lain, karakteristik transformasi industrial yang berlangsung dalam komunitas nelayan ditandai oleh semakin terpisahnya jalan komunitas nelayan miskin dan tradisional dengan nelayan kaya yang semakin termodernisasi.
2. Perkembangan investasi, teknologi dan manajemen juga berpengaruh terhadap pola hubungan sosial toke-anak buah (patron-klien). Sebelum berlangsung modernisasi perikanan, hubungan patron-klien masih ditandai oleh hubungan-hubungan yang bersifat sosial di samping hubungan ekonomi. Namun setelah berlangsung modernisasi perikanan, hubungan patron-klien sudah cenderung sebagai hubungan ekonomi. Selain itu, muncul patron-patron kecil dalam manajemen penangkapan, yaitu seorang nakhoda kapal yang sekaligus sebagai pemimpin rombongan yang dipercaya oleh toke besar.

3. Ikatan patron-klien mengalami transformasi sejalan dengan berlangsungnya diferensiasi sosial, komersialisasi ekonomi, dan semakin kuatnya peran negara. Namun transformasi tersebut belum sanggup menghilangkan kelembagaan patron-klien dalam komunitas nelayan, karena perkembangan tersebut belum mampu menggantikan secara signifikan fungsi-fungsi kelembagaan tersebut. Yang berlangsung adalah transformasi pola-pola hubungan patron-klien tersebut.

6.2. Saran

1. Melihat masih kuatnya hubungan patron-klien dalam komunitas nelayan, meskipun beberapa kondisi yang diharapkan dapat memutus hubungan tersebut sudah tersedia, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut untuk dapat dilakukan rekayasa sosial (social engineering) sehingga muncul pola hubungan yang lebih adil dan setara.
2. Potensi keorganisasian lokal perlu menjadi pertimbangan dalam rangka pengembangan investasi, teknologi dan manajemen sebagai stimulan bagi perkembangan industri perikanan, melalui penghantaran sumberdaya modal (kredit), bantuan peralatan dan bantuan teknis manajerial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa Putra, H.S. 1991. Minawang: Ikatan Patron-Khen di Sulawesi Selatan. Yogyakarta: UGM Press.
- Badaruddin. 2001. Kelembagaan Sosial-Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan: Studi Di Dusun Nelayan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Surnatera Utara. Laporan Penelitian Dosen Muda. Dikti.
- _____. 2004. "Modal Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan". Dalam M. Arief Nasution, dkk. (Editor). Isu-Isu Kelautan: Dan Kemiskinan Hingga Bajak Laut. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Blau, Peter M. 1964. Exchange and Power in Social Life. Chicago: John Wiley and Sons.
- Boissevain, J. 1966. Patronage in Sicily. MAN. (NS) I (1).
- BPPT-Wanhankamnas. 1996. Konvensi Benua Maritim Indonesia. Jakarta: BPPT-Wanhankamnas.
- Burger, H.D. dan Prayudi. 1960. Sejarah Ekonomis dan Sosiologis Indonesia. Jilid 1. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Creswell, John W. 1994. Research Design Qualitative and Quantitative Approaches. Thousands Oaks, London: Sage.
- _____. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousands Oaks, London: Sage.
- Dahuri, Rokhim. 1999. "Reposisi Pembangunan Perikanan Indonesia Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir". Makalah Seminar Kementerian Eksplorasi Laut. JALA-SNSU-FISIP-USU. Medan.
- Denzin, N.K. dan Y.S. Lincoln (Eds.). 1994. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Durkheim, Emile. 1964. The Division of Labor in Society. New York: The Free Press.
- Gassing, A. Qadir. 1991 "Rengge: Studi Tentang Teknologi dan Dampak Sosialnya dalam Kehidupan Nelayan". Dalam Mukhlis (Ed.). Teknologi dan Perubahan Sosial di Kawasan Pantai. P3PM - UNHAS. Ujung Pandang.

- Germani, Gino. 1981. *The Sociology of Modernization: Studies on Its Historical and Theoretical Aspects With Special Regard to the Latin American Case*. London: Transaction Books.
- Ginting, Bengkel. 1996. *Respon Rumah Tangga Nelayan Terhadap Program Pembangunan Bidang ekonomi dan Kesra: Studi Kemiskinan di Dusun Nelayan Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara*. Tesis S-2. IPB. Bogor.
- Goldthorp, H.H. 1992. "Employment, Class, and Mobility: A Critique of Liberal and Marxist Theories of Long Term Change". dalam H. Haferkamp and N.J. Smelser (Eds.) *Social Change and Modernity*. California: University of California Press.
- Gouldner, Alvin. 1977. "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement". Dalam S.W. Schmidt (Ed.). *Friends, Followers, and Factions*. Berkeley: University of California Press.
- Kerr, C., J. Dunlop, F Harbison and C. Myers. 1994. "Industrialism and Industrial Man". Dalam D.B. Grusky (Ed.). *Social Stratification and Sociological Perspective: Class, Race, and Gender*. Oxford: Westview Press.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: L, KiS.
- Legg, K.R. 1983. *Tuan, Hamba, dan Politisi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Lipset, S.M., R. Bendix dan H.L., Zetterberg. 1994. "Social Mobility in Industrial Society". dalam D.B. Grusky (Ed.). *Social Stratification and Sociological Perspective: Class, Race, and Gender*. Oxford: Westview Press.
- Mubyarto; Loekman Soetrisno dan M. Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Rajawali*. Jakarta.
- Polnack, R.B. 1988. "Karakteristik Sosial dan Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil". Dalam: M.M. Cernea (Ed.). *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi di dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: UI-Press.
- Popkin, Samuel. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. California: California University Press.

- Salman, Darmawan dan Siti Bulkis. 1996. Kemiskinan Struktural dan Polarisasi Sosial Pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan Tanalemo Bulukumba. Ujung Pandang: LP Unhas.
- Saith, M. 1986. Location, Linkage, and Leage: Malaysian Rural Industrialization Strategies in National and International Perspective. The Hague:ISSAS.
- Schneider, E.V. 1986. Sosiologi Industri. Jakarta: Aksara Persada.
- Scott, J.C. 1972a. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia". The American Political Science Riview. 66 (1).
- _____. 1972b. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia". Journal of Asian Studies. 33 (1).
- Sitorus, Henry. 1997. Teknologi Tangkap Ikan dan Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Nelayan Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Tesis S-2. UI. Jakarta.
- _____. 2002. Model Matriproduksi dan Perubahan Masyarakat Pantai Propinsi Surnatera Utara. Laporan Penelitian Hibah Bersaing IX.
- Smith, I.R. 1979. A Research Framework for Traditional Fisheries. Manila: ICLARM.
- Tarigan, Kelin. 1991. Pengaruh Motorisasi Penangkapan Terhadap Distribusi Pendapatan Nelayan di Sumatera Utara. Disertasi S-3. Bandung : Unpad.
- Tiryakiyan, E.A. 1992. "Dialectics of Modernity: Reenchanment and Dedifferentiation as Counterprocess". Dalam: H. Haferkamp and N.J. Smelser (Eds.) Social Change and Modernity. California: University of California Press.
- Weber, Max. 1978. Max Weber: Selections in Translation (Ed.: W.G. Runciman). Cambridge: Cambridge University Press.
- Zulkilli. 1989. Pemborong dan Nelayan: Pola Huburigan Patron-Khen pada Masyarakat Nelayan (Studi Kasus pada MasyarakatNelayan bagan deli Kecamatan Medan Belawan Kodya Medan). Tesis S-2. UGM. Yogyakarta